



VOLUME XII / NO. 120 / SEPTEMBER 2017

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL



INFRASTRUKTUR PANTANG MUNDUR

Keterbatasan anggaran bukan halangan. Komitmen pemerintah bangun infrastruktur tetap dijalankan. APBN-P 2017 jadi solusi, demi anggaran yang makin sehat dan ekonomi yang makin kuat.

Daftar Isi



Foto Cover
Anas Nur Huda

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Riahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Prihakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Dewi Rusmayanti, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Francisus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Nur Iman, **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

LAPORAN UTAMA

- 15 Perbaiki Anggaran, Perbaiki Infrastruktur
- 18 Infografis
- 20 Infrastruktur Penggerak Ekonomi
- 23 Manfaat Jangka Panjang Infrastruktur Asian Games
- 25 Perubahan untuk APBN Lebih Kredibel

WAWANCARA

- 27 Mendidik Anak Istimewa

POTRET KANTOR

- 30 PPPM Wujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

FIGUR

- 32 Menebar Manfaat untuk Masyarakat

EKONOMI TERKINI

- 36 Perekonomian Butuh Lebih Banyak Sentimen Positif

KOLOM EKONOM

- 40 Daya Saing Infrastruktur Indonesia di Kancan ASEAN

GENERASI EMAS

- 44 Cerita Generasi Pertama Penerima Beasiswa

OPINI

- 46 Peran Kementerian Keuangan Dalam Peradaban Uber

REGULASI

- 48 Agar Lebih Efektif, Aturan Pengelolaan TKDD Diubah

INSPIRASI

- 50 Pengabdian Masyarakat

RENUNGAN

- 52 Waktu Pulang

FILM

- 53 *Annabelle: Creation*: Bukan Sekadar Spin-Off

JALAN-JALAN

- 54 Reyog Ponorogo yang Termasyhur

SELEBRITI

- 56 Merdeka dalam bercanda



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Bersinergi Menjaga APBN

Pemerintah bersama DPR menyetujui untuk melakukan perubahan APBN 2017, pada rapat paripurna 27 Juli 2017 lalu. RUU APBN-P ini akhirnya disahkan pada 21 Agustus 2017 menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 8 tentang APBN-P. Perubahan APBN ini dengan mempertimbangkan capaian pelaksanaan APBN 2017 semester I.

Secara prinsip, APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2017 ini dilakukan dengan melakukan beberapa efisiensi belanja barang pada Kementerian/Lembaga, yang membuat pemerintah dapat melakukan penghematan. Hasil dari penghematan ini kemudian digunakan untuk program yang mendesak dan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan tanaman hortikultura, penanganan bencana, dan persiapan pemilu/pilkada serta juga persiapan penyelenggaraan Asian Games.

Pada APBN-P 2017, target pendapatan negara dan hibah ditetapkan mencapai Rp1.736,1 triliun dan alokasi belanja negara mencapai Rp2.133,3 triliun. Maka, defisit anggaran dalam APBN-P Tahun 2017 sebesar Rp397,2 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Sepertinya memang pemerintah terlalu berani dengan angka yang mendekati angka defisit maksimal

yang ditetapkan oleh UU Keuangan Negara yaitu sebesar 3 persen dari PDB.

Berdasarkan pengalaman realisasi penyerapan anggaran beberapa tahun terakhir dikisaran 95-97 persen, maka perkiraan defisit anggaran sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 2,67 persen terhadap PDB. Sehingga, diperlukan pembiayaan anggaran sekitar sebesar Rp362,9 triliun untuk menambal defisit anggaran dan meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya kebutuhan pembiayaan yang sangat besar ini, pemerintah perlu lebih banyak menjelaskan kepada masyarakat tentang penggunaan utang untuk APBN. Indikasi awal adanya kritik tentang utang adalah adanya interupsi dari anggota DPR yang menanyakan soal utang pada saat sidang paripurna pengesahan APBN-P 2017.

Edukasi tentang penggunaan uang APBN sangat perlu. Diantaranya edukasi mengenai uang APBN yang dibelanjakan untuk hal produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, dan belanja untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, yaitu belanja sosial. Selain penggunaannya, pengelolaan utang dengan prinsip kehati-hatian dan

transparansi juga dapat memberikan rasa ketenangan kepada masyarakat tentang tingkat utang negara kita. Upaya edukasi ini perlu dilakukan secara kontinyu dan masif, terutama dari K/L pengguna dana APBN terbesar. Kementerian Keuangan tidak dapat melakukannya sendiri.

Selain elemen pemerintah, koalisi juga dapat dilakukan oleh BUMN dan BLU milik pemerintah, sehingga akan semakin banyak lagi masyarakat yang teredukasi. Tak kalah pentingnya, semua elemen pemerintah harus dapat membuktikan bahwa dana yang diterima melalui APBN digunakan dengan sepatutnya serta terjaga akuntabilitasnya. Transparansi menjadi salah satu cara untuk dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Dengan begitu, seluruh elemen pemerintah mempunyai semangat yang sama, yaitu untuk menjaga APBN sebagai instrumen yang efektif dan kredibel untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@kemenkeuRI

#TahukahKamu Kemenkeu turut mendukung event Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang. Selain bersumber dari APBN, pendanaan Asian Games 2018 juga bersumber dari APBD, BUMN, Pemda, sponsor, dan penjualan tiket. Yuk sampaikan dukungan #temankeu supaya persiapan Asian Games 2018

ifanababa
@ifanababa

Dgn prsiapan optimal, dpt mnjadi faktor 'multiplier effect' pningkatan ekonomi, pmbangunan, tnaga krja&prwisata

Rinaldhy
@rinaldhy_24

Mengenalkan budaya&pariwisata lokal Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg merata di sumatera tdk hanya fokus di pulau jawa

Cikal Angga Oktavian @cikaljvelin

Persiapkan #AsianGames2018 sebaik mungkin, manfaatkan anggaran Rp4,5 T utk bangun infrastruktur yg bagus dan modern. Buat negara lain kagum dengan Indonesia, krn dr event #AsianGames2018 pergerakan ekonominya akan tinggi. Dan ingat, infrastruktur pasca #AsianGames2018 jg akan bermanfaat utk menunjang perekonomian negara kita di masa depan



Pajak Bertutur

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan kegiatan “Pajak Bertutur” untuk pertama kalinya diselenggarakan pada 11 Agustus 2017. Program ini merupakan upaya bersama DJP dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam Pendidikan. Kegiatan ini diikuti oleh 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi se-Indonesia.

Foto
Iskanda Teguh Priadi



Masyarakat Wae Rebo dan Kopi

Masyarakat Wae Rebo tak bisa dipisahkan dari kopi. Bahkan dalam sehari mereka bisa minum 8-10 gelas. Arabika dan robusta, kedua jenis kopi ini tumbuh baik di kampung Wae Rebo. Saat musim panen kopi tiba, warga menjemur biji kopi dan mengolahnya secara tradisional.

Foto
Andi
Abdurrochim





16/08

Teks
Resha Aditya

Foto
Biro KLI

Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2018

Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam acara sidang tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-RI, dan Rapat Paripurna DPR RI tahun 2017 di Gedung DPR/MPR RI, Rabu (16/08), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan 9 orang Menteri lainnya melakukan Konferensi Pers “Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2018” di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (16/08). Sembilan orang Menteri tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Airlangga Hartato, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek

Menkeu menyebutkan, dalam postur RAPBN 2018 ditetapkan asumsi dasar makro ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar Rp13.500 per US\$, tingkat bunga SPN sebesar 5,3 persen, rata-rata harga ICP US\$48 per barel, lifting minyak sebesar 800 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,2 juta barel. Pemerintah akan terus meningkatkan penggunaan APBN baik dari sisi penerimaan dan belanja untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan agar makin terwujud keadilan sosial

yang makin nyata. “Subsidi 172,4 triliun terdiri dari subsidi energi Rp103,4 triliun dan subsidi non-energi yaitu subsidi pangan Rp7,3 triliun dan subsidi pupuk Rp28,5 triliun. Kemudian Rp51,1 triliun untuk BBM dan LPG 3 kilo, dan subsidi listrik Rp52,2 triliun. Ini adalah untuk subsidi 450 VA (Volt Amper) dan untuk pelanggan 900 Volt Amper meskipun kemarin banyak yang menyampaikan adanya kenaikan harga listrik namun sebetulnya sebagian masih disubsidi,” kata Menkeu. Dari penerimaan negara Rp1.878,4 triliun berasal dari penerimaan perpajakan Rp1.609,4 triliun dan PNBPN sebesar Rp267,9 triliun. Sedangkan untuk belanja negara Rp2.204,4 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.443,3 triliun yang terdiri lagi untuk belanja K/L Rp814,1 triliun, dan belanja non K/L sebesar Rp629,2 triliun. Sedangkan sisanya dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp761,1 triliun.

Pemerintah akan tetap fokus pada keadilan dan pemerataan seperti untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur serta alokasi pada sektor unggulan (pertanian, pariwisata, dan perikanan). Alokasi APBN 2018 adalah untuk membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Dengan demikian kebijakan fiskal tahun 2018 dapat dikatakan sebagai upaya pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan



25/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Menjadi Pembicara di Supermentor 20

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu narasumber untuk acara Supermentor20 dengan tema *Indonesia's Great Prosperity Ahead: Will It Happen? Will It Be Yours?* di Ballroom Djakarta Theater XXI, Jakarta pada Selasa, (25/07). Menkeu menyampaikan mengenai posisi Indonesia pada saat ulang tahun kemerdekaan yang ke-100 pada tahun 2045, dengan populasi diperkirakan mencapai 309 juta, pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 6 persen per tahun, PDB Indonesia akan mencapai US\$9,1 triliun dengan pendapatan per kapita US\$29.300. Dengan proyeksi tersebut, Indonesia akan menjadi negara terbesar nomor 5 di dunia.



27/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

DPR Setujui Perppu AEoI Menjadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *Automatic Exchange of Information* (AEoI) menjadi Undang-Undang (UU). Penetapan Perppu AEoI merupakan wujud nyata dukungan DPR RI terhadap pemenuhan komitmen Indonesia dalam melaksanakan kesepakatan internasional dan upaya penguatan pengumpulan penerimaan pajak. “Dengan disahkannya Perppu ini menjadi Undang-Undang memberikan keyakinan di dunia internasional bahwa Indonesia mampu dan telah siap untuk mengimplementasikan *Automatic Exchange of Information* pada bulan September 2018” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat paripurna pada Kamis (27/07).

04/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Lantik 2 Pejabat Eselon 1

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik dua orang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan yaitu Dr. Luky Alfirman, sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara serta Arif Baharuddin, sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal pada Jumat (28/07) di Aula Djuanda. “Tugas kita semua tidak mudah, tapi tantangan ini memang adalah tantangan yang akan membuat kita menjadi manusia yang pada suatu saat mungkin bisa melakukan perenungan. Saya cukup berbahagia karena telah mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalam arena menghadapi tantangan ini dan saya tentu berharap seluruh jajaran Kementerian Keuangan tidak mengecewakan dari sisi menghadapi tantangan dan memberikan respons yang secara tepat, cepat, dan akurat,” ujar Menkeu.





Kemenkeu dan POLRI Gagalcan Penyelundupan 1,2 Juta Butir Ekstasi

01/08

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1,2 juta butir yang dikemas ke dalam 120 bungkus dengan berat bruto 2,2 kg per bungkus pada penggerebekan Jumat (01/07). Hal ini diungkapkan pada konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala POLRI Tito Karnavian di Markas Besar POLRI Trunojoyo, Jakarta pada Selasa Jakarta (01/08). “Tadi disampaikan oleh Pak Kapolri, 1,2 juta butir ekstasi kalau dirupiahkan bisa mendekati lebih dari setengah triliun Rupiah. Kalau dikonsumsi, (bisa) 2,4 juta manusia yang menikmati ini” ungkap Menkeu.



03/08

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Diskusi Publik Dana Desa: APBN Pro Rakyat atau Pro Elite

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo menjadi salah satu Narasumber pada acara diskusi publik dengan tema Dana Desa: Pro Rakyat atau Pro Elite pada Kamis, (03/08) di Jakarta yang diselenggarakan oleh Serikat Penerbit Surat kabar (SPS). “Desa terbagi dalam lima kategori, yakni desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Dari total 75.954 desa, sekitar 31,4 persen desa di Pulau Jawa-Bali dan di wilayah Sumatera sekitar 31,2 persen, akan tetapi jumlah desa tertinggal di Pulau Sumatera mencapai 75 persen, oleh karena itu reformulasi pengalokasian Dana Desa sangat penting untuk dilakukan,” jelasnya.

Agenda

04/09

Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Gubernur BI, Pembahasan RUU APBN 2018

06/09

Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menko-Menko, Pembahasan RKA K/L 2018

06-08/09

Asian Fixed Income Summit di Bali

14/09

Rapat Paripurna DPR RI: Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangan

Rakernas Akuntansi 2017 dihadiri K/L dan Kepala Daerah di Jakarta



02/08

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Sesjen Resmikan Rekonstruksi Bangunan Korban Gempa Pidie Aceh

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto menghadiri acara peresmian penggunaan rekonstruksi Gedung SMPN 2 Meureudu dan enam gedung serbaguna kepada masyarakat korban gempa Pidie Jaya Aceh atas sumbangan Keluarga Besar Kemenkeu di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh pada Rabu (02/08). Sesjen menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan seluruh jajaran di Pemda Pidie Jaya atas fasilitasi dan sumbangan, serta kepedulian pegawai Kemenkeu atas pembangunan kembali SMP 2 yang terlaksana dengan baik. "Sungguh ini suatu sinergi yang baik antara tim yang dipimpin Kementerian Keuangan serta seluruh jajaran Pidie Jaya. Kami sangat berharap dengan adanya rekonstruksi SMP 2 ini semakin meningkatkan semangat belajar adik-adik siswa," tambahnya.

Menkeu Berdialog di Program Rosi Kompas TV



13/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab isu utang negara di program Rosi yang ditayangkan di Kompas TV, pada Kamis malam (10/08). Salah satu isu yang ditanggapi yaitu mengenai Menkeu tidak dapat menjawab pertanyaan 'kemana larinya utang'. Ia mengatakan bahwa pernyataannya dipenggal, menurutnya jika Menkeu tidak tahu utang digunakan untuk apa saja, tidak mungkin Indonesia mendapatkan *investment grade* dari berbagai lembaga pemeringkat dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).“Pertanyaan tersebut di DPR dan dipenggal. Kalau saya tidak tahu maka *investment grade* tidak akan naik. Kalau saya tidak tahu, maka LKPP tidak akan dapat WTP,” ungkapnya.

11/08

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kemenkeu Menggelar Dialog Interaktif Pajak Bertutur

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelar dialog interaktif dan kuliah umum melalui acara Pajak Bertutur. Tujuannya untuk mewujudkan generasi yang mempunyai kesadaran pajak. Melalui *teleconference*, Menkeu berdialog dengan anak-anak SDN Ende, SMPN 3, dan SMAN 1 Semarang pada Jumat pagi (11/08) di gedung pusat Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Menkeu ingin masyarakat mulai dari tingkat sekolah harus menyadari bahwa membayar pajak diperlukan untuk pembangunan negara. Tanpa kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam membayar pajak maka negara Indonesia tidak akan menjadi negara maju. “Uang pajak tersebut disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya yang pada akhirnya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.



PERBAIKI ANGGARAN, PERBAIKI INFRASTRUKTUR

Ketukan palu pada 27 Juli menjadi tanda disahkannya tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh DPR. Salah satunya adalah

pengesahan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017. Setelah melewati sejumlah rapat kerja dan paripurna selama kurang dari satu bulan, DPR akhirnya menyetujui RAPBN-P 2017 yang diajukan pemerintah sejak 3 Juli lalu.

Penyesuaian dalam APBN-P 2017 dilakukan demi menjaga sustainabilitas APBN dengan mempertimbangkan beberapa faktor risiko. Diantaranya rasionalisasi target penerimaan perpajakan secara hati-hati, diikuti dengan peningkatan efisiensi pada belanja negara. Sementara peningkatan pembiayaan melalui utang, dilakukan dengan mempertimbangkan pembiayaan defisit anggaran untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan maksud awal disusunnya APBN 2017 pada 2016 lalu.

“Fokus pemerintah adalah mengefektifkan belanja sesuai prioritas, yaitu membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers tentang Nota

Keuangan dan RUU APBN Tahun Anggaran 2017 di Kantor Pusat Ditjen Pajak (16/8/2016).

Disetujui DPR

Ditemui Media Keuangan beberapa waktu lalu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Aziz Syamsudin, mengemukakan tiga alasan disetujuinya RUU APBN-P 2017 oleh DPR. Pertama, pengajuan APBN Perubahan oleh pemerintah dilegalisasi oleh konstitusi, “Baik dalam Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2017 maupun UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD”, jelas Aziz.

Kedua, perbaikan dalam ekonomi global dilihat berdampak pada perekonomian sosial. “Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan lebih tinggi dari target sebesar 5,1 persen, sehingga kami memutuskan menaikkan target pertumbuhan menjadi 5,2 persen,” paparnya.

Ketiga, terdapat beberapa pos belanja yang bersifat mendesak untuk direalisasikan, sehingga membutuhkan perubahan dalam APBN 2017. Misalnya, dalam hal penyelenggaraan pesta olahraga Asian Games, persiapan pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden pada 2018 dan 2019, serta pembebasan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur.

“Pos-pos belanja tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa adanya APBN-P 2017,” terang Aziz.

Kompleks
parlemen
Republik
Indonesia

Foto
Muhammad
Fath

Landasan Perubahan

Beberapa asumsi yang menjadi landasan perubahan APBN 2017 diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dari sebelumnya sebesar 5,1 persen. Selanjutnya, tingkat inflasi diperkirakan lebih rendah menjadi 4,3 persen dibandingkan prediksi sebelumnya sebesar 4,37 persen. Untuk nilai tukar rupiah terhadap dollar diperkirakan menjadi Rp13.400/USD dari sebelumnya Rp13.331/USD.

Sementara itu, tingkat suku Bunga SPN 3 bulan diperkirakan naik menjadi 5,2 persen. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan rata-rata USD48/barel, sedangkan untuk lifting minyak dan lifting gas masing-masing diperkirakan naik menjadi 815 ribu barel/hari dan 1.150 ribu barel setara minyak/hari.

Terkait hal ini, Direktur Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Kunta Wibawa, menyampaikan sejumlah pertimbangan yang menjadi landasan dilakukannya perubahan dalam APBN 2017. Pertama, kondisi perekonomian dan dampaknya bagi APBN. Kedua, adanya kebijakan yang berubah dibandingkan saat penentuan APBN sebelumnya. Ketiga, adanya sejumlah belanja prioritas yang perlu diakomodasi dalam APBN-P 2017.

Kunta menjelaskan, perubahan asumsi yang terjadi utamanya pada harga minyak mentah Indonesia disamping perubahan pada asumsi makro lainnya. “Yang signifikan berubah adalah harga minyak (mentah) yang tadinya USD45/ barel (dalam APBN 2017), kita asumsikan (menjadi) USD50/barel, tapi yang diketok (pada APBN-P 2017) USD48/barel. Itu dampaknya ke pendapatan (negara) terutama dari sumber daya alam,” jelas Kunta.

Selain itu, pemerintah juga menginginkan agar target penerimaan pajak lebih realistis, terutama setelah melihat realisasi pencapaiannya hingga kini. “Dengan kondisi ekonomi sekarang, kita melihat kemungkinan realisasi pajak lebih rendah dibanding targetnya,”

jelas Kunta. Untuk itu, pemerintah menurunkan target penerimaan perpajakan menjadi Rp1.472 triliun. “Meski demikian, asumsi (makro) yang bergerak naik mengakibatkan pendapatan negara bukan pajak bisa bertambah,” ungkap Kunta. Sebagai informasi, penerimaan Negara Bukan Pajak dalam APBN-P 2017 naik menjadi Rp260,2 triliun dari sebelumnya sebesar Rp250 triliun.

Kunta melanjutkan, APBN-P 2017 juga dilakukan dalam rangka mengakomodasi beberapa kebijakan pemerintah yang mengalami perubahan, “Di sisi belanja, ada beberapa kebijakan yang tadinya kita asumsikan akan jalan di 2017 ternyata tidak.” Dia memberi contoh, harga elpiji yang awalnya diasumsikan akan naik, ternyata tidak terjadi. “(Akibatnya) karena harga minyak naik, otomatis (anggaran) subsidi elpiji dan listrik juga akan naik,” terangnya. Dalam APBN-P 2017, belanja subsidi energi mengalami kenaikan dari Rp77, 3 triliun menjadi Rp89,9 triliun.

Tidak hanya itu, beberapa belanja prioritas yang belum masuk dalam anggaran sebelumnya perlu dimasukkan dalam APBN-P 2017. “Kita juga menampung beberapa (belanja) prioritas tadi, seperti Asian Games, persiapan Pemilu, serta sertifikasi tanah,” terang Kunta. Hal ini masuk dalam pos belanja K/L yang mengalami kenaikan Rp35 triliun dari anggaran sebelumnya menjadi Rp798,6 triliun.

Belanja Produktif dan Prioritas

Perubahan APBN 2017 dari sisi belanja, diarahkan lebih produktif dan dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah. APBN-P 2017 menetapkan besaran belanja sebesar Rp2.133,3 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.367 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,3 triliun.

Meski demikan, pemerintah mempersiapkan *outlook* belanja negara yang diprediksi hanya mencapai Rp2.098 triliun. Dengan demikian, defisit APBN diperkirakan hanya mencapai 2,67 persen

dari perkiraan APBN-P 2017 yang sebesar 2,92 persen. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi belanja beberapa tahun terakhir, khususnya belanja Kementerian Lembaga (K/L), Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa dengan tingkat penyerapan 95-97 persen dari pagu yang ditetapkan.

Langkah efisensi pemerintah untuk belanja barang K/L juga masih terus gencar dilakukan. Tercatat, K/L berhasil melakukan efisiensi pada belanja yang dianggap kurang penting hingga Rp16 triliun. Selanjutnya, dilakukan realokasi penghematan untuk sejumlah program dan kegiatan yang bersifat mendesak, produktif, dan prioritas yang masuk dalam anggaran K/L, baik terkait Asian Games 2018, pembangunan infrastruktur, pengembangan tanaman holtikultura, penanganan bencana, hingga persiapan pemilu dan pilkada 2018-2019.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Tujuannya, agar kedua belanja tersebut bisa berperan signifikan dalam mewujudkan target-target pembangunan yang memerlukan sinergi pusat dan daerah. Sementara terkait dengan adanya penurunan pada alokasi dana transfer umum, hal ini sudah sesuai dengan amanat UU APBN, dimana besaran alokasinya disesuaikan dengan pendapatan negeri dalam neto. Meski demikian, diharapkan penurunan ini tidak mengganggu tugas dan pelayanan masyarakat di daerah.

Komitmen pada Infrastruktur

Secara umum, target pendapatan dalam APBN-P 2017 meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.472 triliun, PNBPN sebesar Rp260,2 triliun, dan hibah sebesar Rp3,1 triliun. Dibandingkan besaran alokasi belanja yang mencapai Rp2.133,3 triliun, pembiayaan menjadi demikian krusial. Keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk menunda percepatan infrastruktur Indonesia yang sudah tertinggal.

Pembangunan konstruksi angkutan massal berbasis rel Mas Rapid Transit

Foto Tino Adi Prabowo



Dalam pos pembiayaan investasi misalnya, pemerintah memberikan PMN kepada PT KAI sebesar Rp6,4 triliun untuk operasional prasarana dan sarana Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek dan PMN untuk PT Jakarta Llyod sebesar Rp 379,3 miliar secara nontunai. Selanjutnya, pemerintah juga berinvestasi pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pendanaan pengadaan tanah sebesar Rp12,1 triliun dan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp8 triliun untuk Sovereign Wealth Fund (SWF) guna mengelola dana abadi pendidikan.

Kejar Infrastruktur Indonesia

Tidak dapat dipungkiri kondisi infrastruktur Indonesia cukup jauh tertinggal. Laporan Global Infrastructure Hub (GI Hub) yang dikeluarkan Forum Internasional G20 dalam laman resminya menjabarkan kebutuhan investasi pada 50 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Dalam laporannya disebutkan, hingga 2040 total kebutuhan investasi Indonesia mencapai USD1,7 triliun. Jumlah tersebut hampir lebih besar 1,9 kali lipat bila

dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini. Terdapat sebanyak tujuh sektor yang dikaji, meliputi pelabuhan, jalan, listrik, rel kereta, air, bandara, hingga telekomunikasi.

Terkait hal ini, Kunta menjabarkan penyebab ketertinggalan Indonesia di bidang infrastruktur. “Sejak krisis ekonomi tahun 1998, kita berhenti (fokus pada infrastruktur) karena memang *fiscal space* kita kurang, sehingga (pada saat itu) kita mendorong (anggaran) ke arah subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat,”papar Kunta.

Dia menambahkan, besaran subsidi yang berada di atas Rp300 miliar hingga 2014 membuat pemerintah ‘keteteran’ dalam membangun infrastruktur. Padahal, keterbatasan infrastruktur mengakibatkan sulitnya pergerakan dan mobilitas barang, sehingga berbiaya mahal dan timbul inefisiensi. Bahkan diantara negara Anggota ASEAN, Indonesia jauh tertinggal.

Hal senada diungkapkan Ketua Banggar Aziz, menurutnya, rasio belanja infrastruktur terhadap PDB Indonesia yang mendekati angka 3 persen masih bisa ditingkatkan. “Bahkan, bila kita menggunakan ukuran *World Bank*, mensyaratkan rasionya mencapai 5 persen,” ungkapnya. Sebagai pembanding, Aziz memberi contoh, rasio belanja insfrastruktur Tiongkok dan India sudah mencapai angka 5-7 persen dari PDB-nya.

Belanja infrastruktur dalam APBN-P 2017 menurut Aziz, diprioritaskan pada infrastruktur yang bersifat *multiyears*. “Terutama dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, listrik, jembatan, bandara, pelabuhan laut, jalur kereta api dan terminal penumpang,” kata Aziz. Lebih lanjut, peningkatan anggaran infrastruktur yang signifikan oleh pemerintah dinilai Aziz menunjukkan komitmen

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sudah tertinggal.

Terkait hal ini, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Badan Kebijakan Fiskal saat itu, Parjiono menyampaikan salah satu filosofi dari perubahan APBN 2017 yang berkaitan dengan infrastruktur disamping mengakomodasi program-program prioritas, adalah dalam rangka membuat ruang tumbuh yang lebih besar melalui pembangunan infrastruktur.

Menurut Parjiono, ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memberi ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Dia memberi contoh, Negara Tiongkok pernah memiliki pertumbuhan ekonomi dua digit karena didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang cukup. “Makanya kita harus mengejar (infrastruktur),” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Mandiri, Anton Gunawan turut mengakui kebutuhan Indonesia akan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur Indonesia utamanya diperlukan bagi infrastruktur yang bisa mendorong kegiatan ekonomi swasta.

“Yang kita butuhkan adalah yang bisa men-*generate* kegiatan ekonomi swasta dan meningkatkan investasi dari swasta, itu yang lebih penting,” ungkapnya. Anton menilai, selain penting dalam membangun *interconnectivity* dan *logistic system*, pemerintah perlu mencari kebijakan ekonomi lanjutan seperti apa yang bisa mendukung infrastruktur sehingga bermanfaat bagi perekonomian.

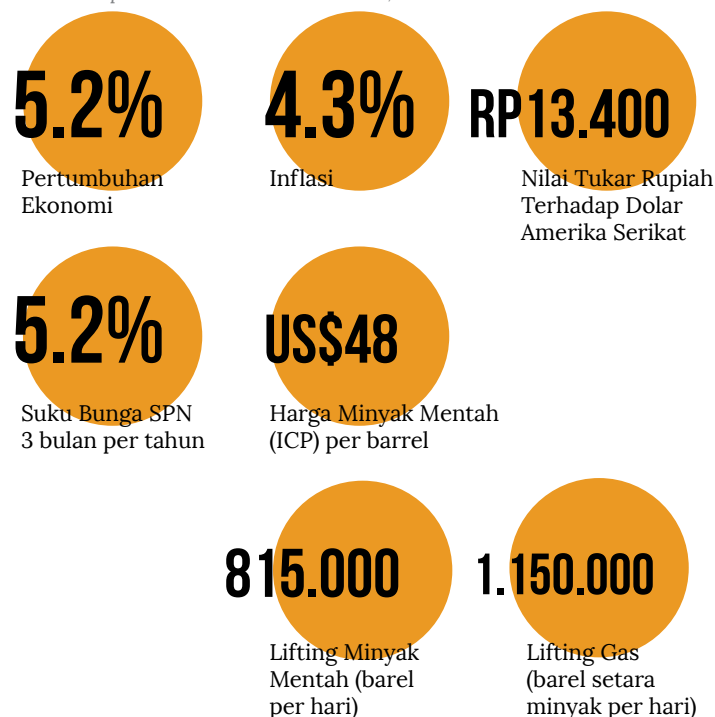
Teks Farida Rosadi

PENYESUAIAN DALAM APBN 2017

PERUBAHAN APBN 2017 telah disetujui pada rapat paripurna 27 Juli 2017. Perubahan APBN ini mempertimbangkan capaian pelaksanaan APBN 2017 semester I dan dilakukan dengan melakukan beberapa efisiensi belanja barang pada Kementerian/Lembaga. Hasil dari efisiensi ini digunakan untuk program yang mendesak, produktif, dan prioritas. Misalnya, yang terkait dengan penyelenggaraan Asian Games 2018, pembangunan infrastruktur, pengembangan tanaman holtikultura, penanganan bencana, serta persiapan pemilu dan pilkada 2018-2019.

ASUMSI MAKRO APBNP 2017

Sumber: Laporan Realisasi I APBNP 2017, DJA



APBN-P TAHUN 2017

Sumber: Laporan Realisasi I APBNP 2017, DJA

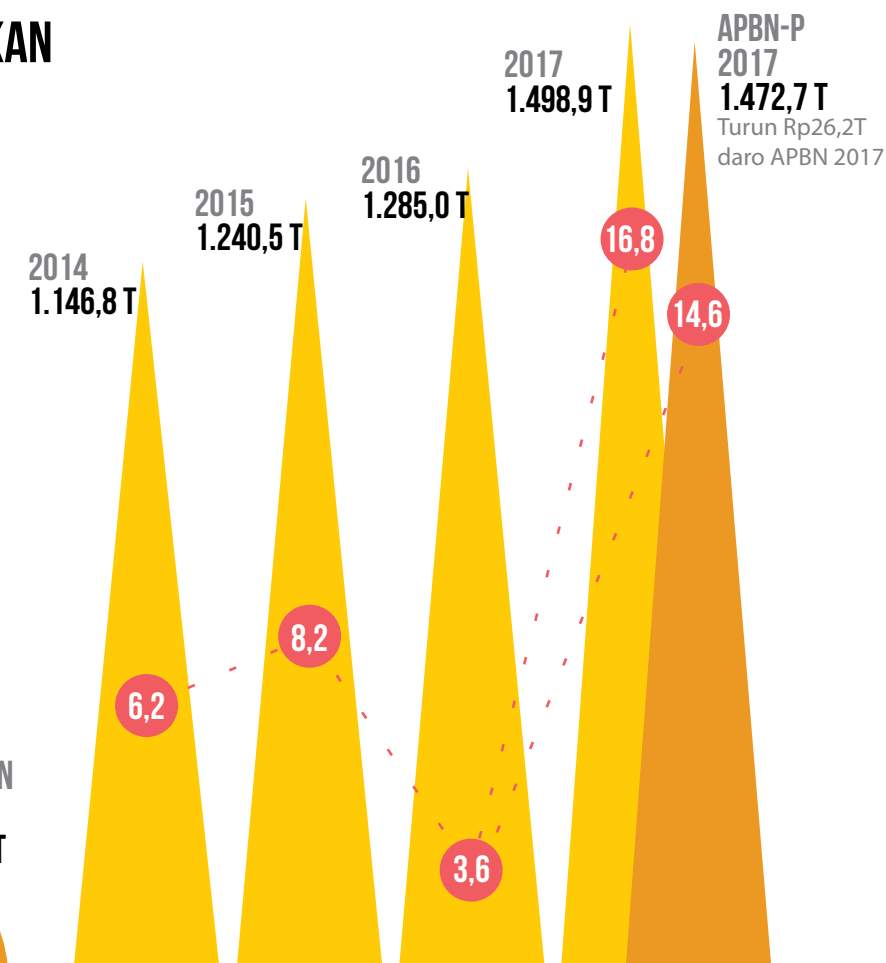
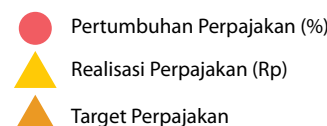


MANFAAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

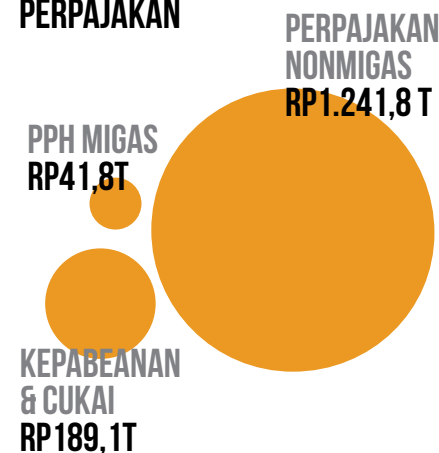


PENERIMAAN PERPAJAKAN YANG REALISTIS

Target pertumbuhan penerimaan perpajakan dikoreksi turun menjadi 14,6% atau turun Rp26,2 T (namun tetap lebih tinggi dari pencapaian di tahun 2016 serta pertumbuhan sejak tahun 2012).



KOMPONEN PENERIMAAN PERPAJAKAN

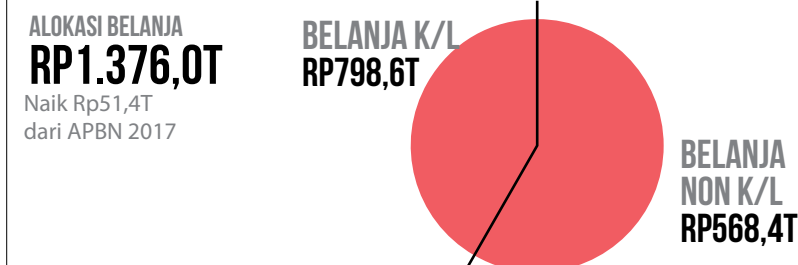


TAX RATIO



BELANJA K/L & NON K/L LEBIH BERKUALITAS

Melanjutkan efisiensi belanja, refocussing pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.



Sumber: Nota Keuangan APBN 2017



INFRASTRUKTUR PENGGERAK EKONOMI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 telah disahkan oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 27 Juli 2017 yang lalu. Perubahan ini dipandang perlu oleh pemerintah dalam rangka menyesuaikan kebijakan yang ada dengan kondisi perekonomian global dan domestik terkini. Dari sisi pendapatan, agar menjadi realistis, target penerimaan perpajakan turun menjadi Rp1.472,7 triliun, namun tetap lebih tinggi dari pencapaian

di tahun 2016 serta pertumbuhan sejak tahun 2012. Sementara itu, belanja pemerintah pusat difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi dan *refocusing* pada belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Di sini, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama di tengah berbagai dinamika perubahan. Tidak hanya itu, pemerintah bahkan menambah penyertaan modal negara melalui LMAN dalam rangka mendukung

keberhasilan dari proyek infrastruktur.

Dalam kesempatan lain di Forum Merdeka Barat Sembilan (FMB9) yang bertemakan Kupas Tuntas APBN-P 2017 “Utang Untuk Apa dan Untuk Siapa?” pada 27 Juli 2017 yang lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan urgensi pembangunan infrastruktur saat ini. Menkeu membandingkan kondisi pembangunan infrastruktur yang jauh tertinggal akibat adanya krisis ekonomi 1997/1998. “Stock dari

infrastruktur terhadap GDP (*gross domestic product*) kita sekarang hanya tinggal 30 persen. Itu menggambarkan GDP kita tumbuh terus tetapi tanpa pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu urgensi infrastruktur itu sangat nyata. Jadi kalau kita bicara tentang infrastruktur, bukan karena hobi, bukan karena kemewahan, tetapi itu karena keharusan dan kebutuhan”, jelas Sri Mulyani.

Belanja infrastruktur

Senada dengan Menkeu, Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran, Kunta Wibawa, menambahkan bahwa sejak krisis ekonomi tahun 1998, pemerintah memiliki keterbatasan *fiscal space* untuk melakukan konsolidasi keuangan negara, sehingga belanja yang ada lebih didorong ke arah belanja subsidi agar mampu menjaga daya beli masyarakat pasca terjadinya krisis. Hal itu mengakibatkan pembangunan infrastruktur menjadi tertinggal jauh. Lebih lanjut, infrastruktur yang kurang akan berpengaruh kepada harga barang yang mahal karena pergerakan barang dari satu titik ke titik lain menjadi sulit atau dikenal dengan istilah *high cost economy*. “Pergerakan mahal, orang mau bergerak susah, mobilitas rendah. Hal-hal ini mengakibatkan inefisiensi terjadi dan kita *lag*-nya jauh sekali dibanding negara-negara ASEAN karena memang waktu itu konsentrasinya tidak di infrastruktur”, ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Badan Kebijakan Fiskal, Parjiono, memaparkan perlunya APBN perubahan ini untuk mendukung kebijakan pemerintah yang tengah berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur/program prioritas pemerintah yang belum dimasukkan dalam anggaran di tahun ini. Misalnya, persiapan Asian Games dan persiapan penyelenggaraan pertemuan IMF dan Bank Dunia yang akan diselenggarakan pada tahun depan. “Jadi lebih kepada bagaimana kita membuat struktur APBN yang lebih kredibel dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi, serta menjalankan program-program prioritas pemerintah di tahun ini, khususnya dalam hal infrastruktur”, ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah lebih difokuskan kepada kebutuhan atau belanja yang paling produktif. “Semua *spending* dari pemerintah itu sebenarnya produktif, punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi, tetapi mana yang dampaknya paling besar itu yang selalu diprioritaskan. Infrastruktur itu salah satunya. Infrastruktur ini menjadi strategis karena infrastruktur itu akan membuat ruang untuk ekonomi tumbuh. Dengan kata lain ruang pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih besar”, jelasnya.

Infrastruktur prioritas

Di sisi lain, terdapat beberapa infrastruktur yang menjadi prioritas pada tahun 2017. Menurut Kunta, pemerintah melalui Kementerian/Lembaga (K/L) akan fokus pada pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara. Untuk jalur darat, pemerintah akan membangun jembatan dan jalan, baik provinsi maupun jalan nasional, termasuk jalur kereta api yang akan dibangun untuk lintas Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Sementara itu, pemerintah

juga fokus membangun pelabuhan-pelabuhan, termasuk pelabuhan perintis dan bandara. Selain itu, infrastruktur dasar untuk pertanian serta pendidikan dan kesehatan juga menjadi sasaran prioritas pembangunan.

“Untuk infrastruktur pangan seperti waduk, irigasi, kemudian penggilingan, itu yang menjadi prioritas pemerintah. Kemudian *education* itu lebih kepada membangun sekolah. Kalau kesehatan itu lebih ke puskesmas, rumah sakit. Jadi dari berbagai sisi, tetapi fokusnya ke infrastruktur yang terkait mobilitas dasar dan yang besar-besar. Kemudian infrastruktur kesehatan dan pendidikan”, jelasnya.

Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan APBN (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal, turut menambahkan bahwa sesuai arahan Presiden, belanja infrastruktur difokuskan untuk mendukung proyek-proyek prioritas seperti infrastruktur pendukung Asian Games, kereta LRT dan MRT, jalan tol, dan pelabuhan. “Di Palembang itu juga selain yang LRT-nya juga ada perbaikan-perbaikan fasilitas lainnya. Perbaikan fasilitasnya itu juga terhubung dengan infrastruktur. Contohnya seperti LRT yang dari Kelapa Gading ke Rawamangun. Itu kan juga untuk mendukung Asian Games. Tapi itu termasuk belanja infrastruktur juga. Jadi memang kalau untuk Asian Games ini ada infrastruktur yang berupa jaringan, ada juga infrastruktur yang berupa pembangunan sarana prasarana olahraga”, jelasnya.

Infrastruktur tekan ketimpangan

Direktur Penyusunan APBN Kunta juga menjelaskan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan dalam APBN-P akan difokuskan kepada sasaran yang lebih tertarget agar lebih efektif. Harapannya, perbaikan pendidikan dan kesehatan tersebut akan bisa menjadi modal untuk meningkatkan *future income* dari masyarakat. “Itu *kan* semakin tinggi pendidikan kita, semakin besar kemungkinan memperoleh pekerjaan lebih baik. Semakin sehat kita, maka akan semakin produktif. Perlindungan sosial ini benar-benar kepada orang-orang yang harus kita bantu, kelompok yang 40 persen ke bawah, sehingga harusnya nanti *Gini coefficient* semakin kecil”, jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah memulai melakukan reformasi kebijakan struktural ekonomi pada tahun 2015 dengan merealokasikan belanja subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran. Efisiensi dari belanja subsidi tersebut dialihkan ke belanja infrastruktur. Harapannya, dengan pengalihan tersebut akan mampu mengurangi

Belanja infrastruktur difokuskan untuk mendukung proyek-proyek prioritas

Foto
Tino Adi P

ketimpangan dan kesenjangan di masyarakat. Di samping itu, untuk mengurangi ketimpangan di daerah, infrastruktur dasar juga menjadi prioritas program pemerintah daerah. Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa perlu didorong untuk mendukung infrastruktur dasar di daerah. Salah satunya, pada tahun 2017 ini, pemerintah mulai menerapkan peraturan bahwa daerah diharuskan untuk mengalokasikan 25 persen dari DBH (Dana Bagi Hasil) dan DAU (Dana Alokasi Umum) untuk pembangunan infrastruktur dasar di daerahnya masing-masing.

Menambahkan hal tersebut, Kepala PKEM, Parjiono mengungkapkan bahwa konektivitas dapat menghubungkan antarwilayah melalui jalur laut, darat, dan udara sehingga potensi-potensi ekonomi bisa lebih lancar dalam menyalurkan distribusi barang dan jasa. Petani, misalnya, kesulitan dalam menjual barang-barangnya saat panen karena transportasi yang kurang memadai, sehingga hanya dijual di pasar lokal dengan harga yang murah. Padahal apabila dijual di daerah yang membutuhkan akan memperoleh hasil yang lebih baik. Selain itu, kemudahan akses konektivitas akan mampu menurunkan biaya logistik yang dapat menurunkan harga barang. Dalam jangka pendek, hal tersebut mampu memberikan dampak langsung yang dapat dinikmati oleh petani, demikian juga untuk sektor lainnya.

Peran BUMN dan swasta

Terkait dengan kebutuhan infrastruktur Indonesia yang besar, Direktur PAPBN, Kunta menjelaskan bahwa tidak mungkin

semua pembiayaan berasal dari APBN. Kebutuhan infrastruktur diperkirakan sekitar Rp5.500 triliun dalam jangka waktu lima tahun. Padahal dalam APBN, setiap tahunnya hanya mengalokasikan sekitar Rp300-400 triliun. Artinya, selama lima tahun hanya akan terkumpul pada kisaran Rp 2.000 triliun. Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong partisipasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta untuk mengisi kekurangan tersebut melalui berbagai skema kerja sama, termasuk PPP (*public-private partnership*).

Untuk mendorong peran swasta agar mau berpartisipasi lebih jauh, ia menjelaskan salah satunya dengan mengoptimalkan peran dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Dalam hal ini, pemerintah akan membantu menyediakan/menjamin ketersediaan tanah agar sektor swasta atau BUMN tidak terkendala risiko kepemilikan tanah saat membangun infrastruktur. Menurutnya, risiko proyek infrastruktur menjadi tinggi karena harga tanah yang sudah naik di awal terlebih dahulu. “Kita tambah PMN (penyertaan modal negara) untuk LMAN sekitar Rp 12,1 triliun, jadi totalnya Rp 32,1 triliun untuk mendukung penggantian tanah. Selain itu, ada juga PMN untuk kereta api, yaitu untuk penyelesaian LRT, baik di Jakarta ataupun di Palembang, termasuk untuk Asian Games”, jelasnya.

Di sisi lain, *chief economist* Bank Mandiri, Anton Hermanto Gunawan, turut menjelaskan bahwa sektor perbankan bisa menjadi salah satu alternatif untuk pembiayaan infrastruktur. Misalnya dengan mendukung pendanaan

melalui *capital market* atau dengan langsung pendanaan ke *project based*-nya yang sudah dilakukan oleh beberapa BUMN. Ia menjelaskan beberapa kendala dalam membeli obligasi atau *securities* dari suatu proyek infrastruktur seperti jalan tol yang baru dikarenakan jangka waktunya yang panjang, tingkat *uncertainty*-nya yang tinggi, serta permasalahan terkait *land clearing*. Terkait masalah pembebasan lahan, Anton menilai pemerintah saat ini sudah cukup baik dengan membuat *land bank* melalui LMAN untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Menjaga keberlanjutan fiskal pembangunan

Untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan infrastruktur, pemerintah juga perlu menjaga postur APBN yang kredibel, realistis, dan *sustainable*. Kepala PKEM, Parjiono, menjelaskan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi. “Risikonya ada risiko dari eksternal, yakni kondisi global yang tidak menentu. Kalau Tiongkok ekonominya menurun terlalu tajam, kita pasti terpengaruh, dan dampaknya ekspor kita turun. Amerika dan kondisi geopolitik, misalnya masalah terkait Amerika dan Korea Utara, ini juga menciptakan ketidakpastian. Itu misalnya akan mempengaruhi harga komoditas karena ekspor kita komoditas. Kemudian negara-negara Eropa yang belum pulih dan negara maju juga yang sedang menghadapi pemilu seperti di Jerman. Itu menjadi resiko-resiko eksternal yang harus kita waspadai supaya ekonomi kita bisa melewati semua tantangan itu”, jelasnya.

Dari sisi domestik, menurutnya, tantangan yang perlu segera diselesaikan berupa kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Untuk itu, APBN harus mampu menyeimbangkan ekonomi dan bisa meng-*address* masalah-masalah tersebut. Perlu kebijakan yang lebih komprehensif terkait program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial, beasiswa, dan kartu sehat untuk meningkatkan taraf hidup dan mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam APBN-P 2017, misalnya, kebijakan untuk PKH dinaikkan menjadi 10 juta rumah tangga dari 6 juta keluarga. Lalu, pembangunan infrastruktur terus dilakukan meskipun banyak tantangan karena keterbatasan dana.

Teks Abdul Aziz

MANFAAT JANGKA PANJANG INFRASTRUKTUR ASIAN GAMES

Gelora Bung Karno Senayan

Foto
Arif K



Tak lama lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah pesta olahraga Asian Games 2018. Untuk itu, pemerintah terus memacu rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga beserta infrastruktur pendukung kegiatan. Pembangunan dilakukan di dua kota yakni Palembang dan Jakarta.

Persiapan untuk menyukseskan Asian Games dilakukan pemerintah secara serius. Sebelumnya, dalam rapat terbatas Asian Games, Presiden Joko Widodo mengatakan momentum Asian Games 2018 akan memberi manfaat yang besar. “Jangan berpikir bahwa itu semua dibangun hanya untuk Asian Games semata. Kita membangun infrastruktur itu juga untuk kepentingan kemajuan bangsa kita di masa depan,” ujar Presiden.

Menurut Askolani, Direktur Jenderal Anggaran, pembiayaan Asian Games 2018 terdiri dari pembiayaan fisik dan nonfisik. Pembiayaan fisik meliputi penyediaan infrastruktur seperti penataan kawasan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Wisma Atlet di Kemayoran dan Komplek Olahraga Jakabaring Palembang, serta pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) atau kereta rel ringan di Palembang dan Jakarta. Sementara, untuk pembiayaan nonfisik meliputi pembiayaan pendukung atlet Indonesia, pembiayaan penyelenggaraan acara, serta pembiayaan administrasi panitia penyelenggara (Inasgoc), serta Kementerian/Lembaga terkait.

Askolani memaparkan, biaya pembangunan dan renovasi GBK Senayan sebesar Rp 2,5 miliar dilaksanakan secara kontrak multi tahun 2016-2017. Selain untuk penataan kawasan komplek, anggaran ini juga digunakan untuk pembangunan 14 sarana olahraga,

yakni stadion utama, fasilitas latihan, stadion renang, lapangan hoki, lapangan panahan, lapangan sepakbola, istana olahraga, stadion tenis dalam dan luar ruang, stadion madya, lapangan baseball, serta gedung basket.

Untuk biaya pembangunan infrastruktur komplek olahraga Jakabaring Palembang, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp262,07 miliar. Dana ini digunakan untuk membangun fasilitas olahraga dayung dan menembak. Penataan kawasan wisma atlet Kemayoran membutuhkan anggaran sebesar Rp97,31 miliar. Sementara, pembangunan 10 menara wisma menelan biaya Rp3,5 miliar. “Wisma atlet ini memiliki kapasitas 7.542 unit dan dapat menampung 15.048 orang,” ungkap Askolani. Keseluruhan pembiayaan ini belum termasuk anggaran pembangunan transportasi seperti LRT Palembang, LRT Kemayoran Jakarta, dan pembenahan bandara di Palembang dan Jakarta.

Anggaran untuk pembiayaan fisik dan nonfisik Asian Games 2018 sudah dialokasikan mulai tahun 2015 hingga pelaksanaannya di tahun 2018. Alokasi pembiayaan tersebut dilakukan melalui 3 Kementerian/Lembaga (K/L) yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Perhubungan. Jika dilihat dari alokasi anggaran di ketiga K/L tersebut, komposisi perbandingan pembiayaan fisik dan nonfisik Asian Games 2018 pada dua tahun

terakhir kurang lebih sekitar tiga banding satu.

Untuk alokasi pembiayaan nonfisik seperti pengamanan, kesehatan, kebersihan, dan lain-lain akan dialokasikan pada tahun anggaran 2018 saat mendekati penyelenggaraan acara. “Kementerian Keuangan sendiri melalui Ditjen Bea dan Cukai bertugas memfasilitasi kelancaran kepabeanan barang-barang untuk kebutuhan Asian Games. Namun, tidak ada alokasi anggaran khusus untuk itu,” terang Askolani.

Penyelenggaraan Asian Games 2018 akan dilaksanakan oleh Inasgoc. Dana yang dibutuhkan oleh Inasgoc diperkirakan mencapai Rp8,69 triliun. Namun, pemerintah hanya dapat mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,25 triliun untuk tahun 2016-2018. Inasgoc selaku panitia pelaksana berencana untuk mencari dana tambahan dari sumber lain di luar APBN. Misalnya saja melalui *sponsorship* dari pihak BUMN dan swasta, iklan, hibah, dan sebagainya, sebagaimana proyek-proyek infrastruktur lain yang juga berbagi dana dengan badan usaha lainnya.

Selain akan membawa nama harum bangsa, perhelatan ini diharapkan memberi keuntungan jangka panjang. Baik dari sisi pembinaan olahraga nasional, pemanfaatan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata, serta perekonomian secara luas. “Pembangunan infrastruktur pendukung memang tidak akan mencapai titik impas saat Asian Games usai. Namun, masyarakat dapat menggunakannya dalam waktu lama. Wisma atlet di Kemayoran contohnya, sebenarnya merupakan rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Paska pelaksanaan Asian Games, bangunan tersebut akan dikelola sebagaimana tujuan semula,” ujar Askolani. Selain itu, LRT dan jalan tol yang menunjang kelancaran pelaksanaan Asian Games 2018 dengan sendirinya akan menggerakkan ekonomi.

Teks Irma Kesuma



PERUBAHAN UNTUK APBN LEBIH KREDIBEL

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 mengalami penyesuaian untuk merealisasikan pos anggaran yang bersifat mendesak. Semangat menjadikan APBN lebih kredibel dan akuntabel terus digelorakan dalam penyusunan APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2017 ini. Simak wawancara Media Keuangan dengan Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Azis Syamsuddin mengenai pengesahan APBN-P 2017.

Ketua Banggar Azis Syamsuddin dalam sebuah rapat.

Foto
Dok. Biro KLI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN-P tahun 2017 menjadi UU. Apa yang menjadi pertimbangan Badan Anggaran DPR RI dalam menyetujui usulan APBN-P 2017?

Saat mengusulkan APBN-P 2017, tentunya pemerintah memiliki indikator perubahan yang kemudian berkembang menjadi sebuah penyesuaian atau perubahan. Indikator itu berupa asumsi dasar ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai kurs, kondisi perpajakan, dan sebagainya. Perubahan itu dibahas bersama 10 fraksi di DPR hingga akhirnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Ada beberapa pertimbangan Badan Anggaran DPR dalam menyetujui APBNP 2017. Pertama, sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) bahwa pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi tertentu, bisa mengajukan APBN perubahan pada tahun berjalan. Kedua, ada beberapa pos anggaran yang bersifat mendesak untuk bisa segera direalisasikan sehingga memerlukan perubahan dalam APBN 2017, yaitu penyelenggaraan Asian Games 2018, pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan presiden (pilpres), serta pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

Terdapat penyesuaian angka dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang diajukan pemerintah, apa yang latar belakang perubahan tersebut?

Kami melihat mulai terjadi perbaikan ekonomi global yang berdampak terhadap perekonomian

nasional. Maka perlu dilakukan penyesuaian dalam APBN 2017. Salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan lebih tinggi dari target sebesar 5,1 persen, sehingga kami memutuskan menaikkan target pertumbuhan menjadi 5,2 persen. Target inflasi juga mengalami perubahan, dari 4,0 persen dalam APBN 2017 kemudian berubah menjadi 4,3 persen. Nilai tukar juga berubah, dari Rp13.300 dalam APBN 2017 menjadi Rp13.400 dalam APBN-P 2017. Selain itu, terjadi perbaikan tingkat harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude oil Price/ICP), dari 45 USD per barel kemudian menjadi 50 USD per barel.

Pemerintah telah berupaya agar APBN 2017 dapat dijalankan dengan realistis dan kredibel. Menurut Anda, apa saran bagi pemerintah dalam pengelolaan APBN?

Ada beberapa hal yang menjadi catatan Badan Anggaran DPR. Pertama, kami perlu mendorong pemerintah agar menggunakan data yang valid dan sumber data tunggal dari lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah sendiri. Kedua, terkait dengan program subsidi yang akan berdampak besar terhadap masyarakat, seperti LPG, listrik, BBM, pemerintah perlu melakukan persiapan yang matang dan sosialisasi yang cukup sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Ketiga, demi menciptakan APBN yang kredibel, akuntabel dan berkelanjutan, konsistensi pemerintah dalam menyusun anggaran yang efektif dan efisien perlu terus ditingkatkan, terutama dalam merelokasi anggaran dari yang kurang produktif menjadi

anggaran yang bersifat produktif. Keempat, dalam menentukan target pendapatan pajak dan PNBPN, pemerintah perlu lebih berhati-hati sehingga tidak menimbulkan *shortfall* yang terlalu besar.

Pemerintah terus konsisten untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia. Apa yang perlu ditingkatkan terhadap pembangunan infrastruktur ke depan?

Kami di Badan Anggaran DPR sepakat dan mendukung rencana Pemerintah dalam mendorong belanja infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesenjangan. Namun kami perlu memberikan catatan dan evaluasi terhadap penggunaan belanja infrastruktur yang sudah dilakukan pemerintah selama ini.

Pertama, perlu ada evaluasi terhadap program pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama ini, apakah sudah sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang sudah ditetapkan selama ini. Kedua, sejauh mana implikasinya terhadap perekonomian masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan antara penduduk dan wilayah.

Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 2018. Event besar berskala internasional ini juga mendapat alokasi anggaran dari APBN-P 2017. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal ini?

Kami memandang Asian Games 2018 adalah event besar yang harus kita sukseskan karena akan memberikan dampak yang besar, baik dari sisi ekonomi maupun kepercayaan dunia internasional kepada kita. Bentuk komitmen kami adalah dengan mengalokasikan tambahan belanja beberapa kementerian/lembaga melalui Kemenpora (Inasgoc), TVRI, dan Kominfo guna mensukseskan pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

Kami mencatat terdapat sejumlah target pembangunan yang harus segera dituntaskan, seperti renovasi penataan kawasan di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno, pengerjaan Wisma Atlet Kemayoran, dan Wisma Atlet Jakabaring, dan beberapa *venue* yang juga harus segera dituntaskan dalam waktu dekat, baik yang ada di Jakarta maupun Palembang.

Teks Pradany Hayyu



Mendidik Anak Istimewa

Anak adalah anugerah terindah bagi setiap orang tua. Mereka perlu dirawat dengan penuh cinta kasih. Namun, bila anak tersebut berkebutuhan khusus, pendampingannya pun tentu istimewa. Purnamawati M Reksoprodjo, Ketua YPAC Jakarta, menuturkan kepada Media Keuangan, bagaimana kita dapat membantu anak-anak unik dan spesial ini untuk dapat menikmati hidup meski tidak sempurna.

Balita sedang
Menjalani Terapi
Berjalan

Foto
Anas Nur Huda

Seperti apa definisi anak berkebutuhan khusus?

Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik tertentu yang berbeda. Namun, tidak selalu merujuk pada ketidakmampuan fisik, tetapi juga ketidakmampuan non fisik seperti mental, emosional, dan sosial. Aspek non fisik bersifat kognitif dan psikologis. Misalnya ada anak dengan fisik normal dan sangat cerdas. Dia mudah bosan dengan situasi belajar pada umumnya, sehingga model pembelajaran perlu diakselerasi dan diperkaya. Ada juga anak dengan kesulitan belajar seperti disleksia yaitu kesulitan membaca atau menulis, dan afasia atau kesulitan berbicara.

Contoh anak dengan gangguan mental misalnya saja ansietas, *attention deficit/hyperactivity disorder*, autisme, retardasi mental, dan gangguan makan. Ada juga anak dengan keterbatasan fisik atau panca indera seperti tuna rungu, tuna netra, dan tuna daksa. Sementara untuk gangguan pada aspek sosial contohnya adalah anak dengan ketergantungan zat adiktif. Kebutuhan khusus tersebut ada yang permanen akibat kelainan tertentu dan ada yang temporer, misalnya anak yang mengalami hambatan belajar atau kesulitan menyesuaikan diri.

Apa saja layanan yang diberikan oleh YPAC Jakarta?

Pertama, YPAC Jakarta memiliki poliklinik bekerjasama dengan tim ahli medis. Mereka secara sukarela menyediakan waktu dan tenaga untuk memberi layanan kesehatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Layanan yang diberikan berupa dokter umum, dokter gigi, dan psikolog. Kami juga memberi terapi berupa fisioterapi, hidroterapi,

terapi wicara, terapi okupasi, terapi sensori integrasi, snoezelen, dan bengkel sepatu khusus.

Kedua, layanan pendidikan berupa Sekolah Luar Biasa (SLB). Jenjang pendidikan yang tersedia adalah TK-LB, SD-LB, SMP-LB, SMA-LB, dan kelas ketrampilan atau unit karya. Terakhir, kami memberi layanan sosial berupa tempat penitipan anak, asrama bagi anak berkebutuhan khusus, pendampingan kepada orangtua atau pasien, dan program orang tua asuh.

Untuk seluruh layanan tersebut, YPAC Jakarta memberikan keringanan atau bahkan pembebasan biaya kepada pasien atau siswa dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Disamping itu, saat ini kami mempunyai 3 orang anak asuh yang tinggal di asrama. Kami berusaha memberi layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial yang terintegrasi dalam satu area. Saat ini layanan yang diberikan oleh YPAC Jakarta dikhususkan bagi anak-anak cacat tubuh sebagai akibat penyakit Poliomyelitis dan Cerebral Palsy atau gangguan gerakan, otot, dan postur.

Bagaimana cara YPAC Jakarta menemukan bakat unik dan potensi anak yang beragam?

Kami melakukan pendidikan minat dan bakat melalui observasi sesuai penerapan kurikulum SLB. Contohnya, melalui observasi kami menemukan bahwa salah satu murid kami bernama Heidi Khodijah T berbakat dalam bidang seni suara. Dia menjadi juara lomba menyanyi tingkat DKI Jakarta. Ada juga siswa yang berbakat di bidang olahraga. Salah satu siswa bernama Carlos Vidas S memenangkan lomba balap kursi roda tingkat DKI Jakarta.

Selain itu, melalui observasi dan terapi akan terlihat bakat-bakat lain

seperti di bidang komputer, pertanian, memasak, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Untuk dapat menemukan bakat unit dan potensi masing-masing anak, pengurus yayasan juga melibatkan tim ahli di bidangnya masing-masing untuk mengobservasi mereka. Baik dokter, psikolog, terapis, dan para guru.

Selama 60 tahun lebih YPAC menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas, miskonsepsi seperti apa yang paling sering Saudara temui?

Biasanya, masyarakat melihat anak berkebutuhan khusus hanya butuh bantuan fisik saja. Misalnya kursi roda, alat bantu jalan, sepatu khusus, atau kendaraan dengan desain khusus pengguna kursi roda. Padahal sebenarnya mereka juga membutuhkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan sosial, aksesibilitas ke seluruh area publik, hingga bersosialisasi dengan masyarakat.

Secara keseluruhan, anak berkebutuhan khusus butuh layanan terintegrasi dengan tujuan untuk melatih kemandirian mereka, setidaknya untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Disamping itu, keluarga anak berkebutuhan khusus juga memerlukan bantuan dan bimbingan untuk menangani serta melatih anak tersebut di rumah.

Seperti apa kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas, terutama di sektor formal?

Kerusakan otak yang terjadi pada anak dengan *Cerebral Palsy* kemungkinannya kecil untuk dapat pulih dan normal. Sebab itu, sulit bagi mereka untuk bekerja di sektor formal. Tujuan terapi kami di sini adalah agar anak-anak tersebut dapat menjadi semandiri mungkin untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya untuk



Purnamawati M Reksoprodjo, Ketua YPAC Jakarta

Foto Anas Nur Huda

berpakaian, memegang sendok garpu, atau mandi sendiri. Hal-hal kecil tersebut sulit mereka lakukan karena koordinasi otot-ototnya lemah. Namun untuk sektor informal, seperti kesenian dan olahraga disabilitas, kesempatan anak berkebutuhan khusus akan jauh lebih besar.

Bagaimana mendukung orangtua agar cakap mendampingi anak berkebutuhan khusus?

Hal yang paling utama adalah dengan cara melibatkan orangtua dalam seluruh kegiatan anak berkebutuhan khusus di YPAC Jakarta. Contohnya saja, saat anak sedang menjalani terapi, orangtua bisa melihat mekanisme dan tahap-tahap terapinya. Kemudian cara-cara tersebut bisa dipraktekkan dan dilatih sendiri di rumah sesuai arahan dari terapis.

Selain itu, orang tua juga perlu menambah pengetahuan melalui seminar, penyuluhan, dan konsultasi psikologi.

Kebijakan seperti apa yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus agar bisa mengembangkan pribadinya?

Setiap manusia lahir dengan hak dan kebutuhan dasar yang sama, demikian juga dengan anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, dimensi utama yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas. Setiap anak berkebutuhan khusus, misalnya tuna daksa, juga berhak mendapat kemudahan akses jalan ke pasar, halte bis, rumah sakit, sekolah, trotoar, dan lain sebagainya. Namun, saat ini tidak semua fasilitas umum mempunyai fasilitas *ramp* atau jalan landai. Akibatnya mereka mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas publik yang akhirnya semakin menghambat perkembangan pribadinya. Selain itu, tak kalah penting untuk diperhatikan adalah akses pendidikan, kesehatan, serta kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan sosial.

Bagaimana masyarakat bisa membantu YPAC Jakarta?

Uluran tangan dermawan sangat membantu upaya pembinaan anak-anak istimewa, baik dalam bentuk barang, tenaga sukarela, atau biaya operasional. Jarang sekali lembaga atau perusahaan yang mau membantu biaya operasional sebab dana tersebut akan langsung habis untuk keperluan sehari-hari, tidak seperti bantuan renovasi gedung dan alat yang bisa digunakan lebih lama.

Donasi tidak datang rutin setiap bulan, sementara biaya perawatan gedung dan peralatan, upah tenaga kerja, serta terapi anak-anak sangat tinggi. Misalnya ada anak yang memerlukan 6 kali terapi setiap bulan dengan biaya Rp300 ribu sekali terapi. Namun, keluarganya hanya mampu membayar untuk dua kali terapi per bulan. Di satu sisi kami harus memberi keringanan karena misi sosial, namun di sisi lain kami kesulitan biaya.

Bagi masyarakat yang memiliki dana terbatas atau ingin menyumbang kepada si anak langsung, bisa juga bisa menjadi orang tua asuh. Satu anak bisa 'diasuh' oleh 5-6 orang. Masing-masing orang tua asuh bisa membantu semampunya. Misalnya ada yang mampunya menyumbang Rp200 ribu sebulan atau ada yang bisa menyumbang sepatu dan tas sekolah. Semuanya kami terima. Kami membuka rekening donasi melalui Bank Mandiri nomor rekening 126.006.000.13.01 atas nama YPAC Jakarta. Lakukan semua kebaikan yang anda bisa, dengan segala cara, di segala waktu dan tempat, selama anda bisa.

Teks Irma Kesuma

PPPM Wujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Politeknik Keuangan Negara STAN

Transformasi dengan melakukan perbaikan secara lebih masif, integral, dan terstruktur sangat diperlukan demi organisasi yang lebih baik. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sejak lama telah melihat kebutuhan organisasi yang semakin besar. Hingga akhirnya Menteri Keuangan menetapkan perubahan kelembagaan STAN melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN.

Dengan berubahnya STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara bagi Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lain, dan pemerintah daerah. Layaknya perguruan tinggi lainnya, PKN STAN juga turut menjunjung visi dan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat.

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, PKN STAN memiliki Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) yang berlokasi di Gedung M lantai 1 Kompleks PKN STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro

Jaya, Tangerang Selatan. Selain diatur dalam PMK Nomor 137/PMK.01/2015, struktur PPPM juga tertuang dalam PMK Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN.

Program Unggulan

“Penelitian dan Pengabdian adalah dua tugas pokok PPPM,” jelas Kepala PPPM, Tanda Setiya. Penelitian dilakukan dengan berkoordinasi antara Program Studi, Jurusan, dan mitra atau unit teknis di lingkungan Kementerian Keuangan atau *stakeholders* lain. “Kampus kita adalah kampus vokasi atau terapan, maka penelitian yang kita kembangkan di PPPM adalah penelitian terapan, yang dapat memberikan manfaat langsung bagi *stakeholders* kita (khususnya Kementerian Keuangan)” lanjut Tanda.

Di sisi lain, program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan merujuk pedoman dari Kemenristek Dikti. Selain juga dilakukan program pengabdian sesuai dengan keilmuan yang menjadi keunggulan PKN STAN, yaitu keuangan negara, keuangan daerah, dan keuangan desa. Seiring dengan kebijakan Dana Desa tahun 2017, pengabdian masyarakat PKN STAN diarahkan untuk melakukan pendampingan pengelolaan keuangan desa, khususnya di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Program pengabdian masyarakat lain meliputi

pemberdayaan, pendampingan, dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bekerja sama dengan *stakeholders*.

Capaian Kinerja

Dalam menjalankan tugasnya, PPPM ditargetkan untuk mengkoordinasikan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan PKN STAN. Target kinerja tersebut diantaranya menghasilkan tulisan atau publikasi jurnal ilmiah dengan akreditasi nasional sebanyak empat publikasi. Dalam bidang penelitian, tiap dosen diharapkan mampu melakukan penelitian sekali dalam setahun. Sedangkan dalam bidang pengabdian masyarakat, PPPM ditargetkan melakukan 12 kegiatan dalam setahun.

Hingga saat ini, penelitian yang telah dilakukan PKN STAN sepanjang tahun 2017 sebanyak 13 penelitian dan penelitian yang masih berlangsung sebanyak 12 penelitian. Di samping itu juga terdapat Call For Paper sebanyak 32 publikasi, publikasi jurnal nasional terakreditasi sebanyak satu jurnal, dan jurnal bereputasi internasional (Scopus) sebanyak dua jurnal.

Dalam menjalankan fungsinya, sumber daya manusia PPPM lebih bersifat koordinatif. Kepala PPPM dibantu oleh empat fungsional dosen yang menjadi perwakilan masing-masing jurusan PKN



Kantor PPPM di Kompleks Kampus PKN STAN

Tanda Setiya, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)

Foto Anas Nur Huda



STAN terkait program penelitian dan pengabdian masyarakat. Empat jurusan tersebut antara lain Akuntansi, Pajak, Kepabeanaan dan Cukai, serta Manajemen Keuangan. Di samping itu, PPPM juga didukung oleh tenaga administratif sebanyak lima pegawai yang berstatus PNS dan non-PNS.

Setiap langkah kerja organisasi tentu tak lepas dari tantangan. Bagi PPPM, tantangan merupakan sarana untuk mencapai kekuatan organisasi yang lebih baik. “Kini, PPPM sedang menghadapi empat hal yang perlu ditingkatkan, yaitu regulasi, sumber daya manusia, target, dan kemitraan,” tutur Tanda. Pertama, regulasi yang menjadi payung hukum bidang penelitian dan pengabdian masyarakat hingga saat ini sedang kami sempurnakan. Maka, PPPM banyak berkoordinasi dengan Kemenristek Dikti dan beberapa kampus tentang proses penyusunan peraturan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kedua, PPPM berupaya menyelenggarakan berbagai workshop untuk meningkatkan pemahaman seluruh dosen dan staf PPPM mengenai penelitian dan pengabdian masyarakat. “Selama ini dosen kami belum terbiasa turun ke masyarakat, maka pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan,” jelas Tanda.

Ketiga, target yang harus dicapai oleh PPPM sangat menantang untuk

lembaga pendidikan yang baru saja berdiri. Bahkan ada salah seorang dosen yang mengirimkan tulisan ke jurnal nasional, sudah hampir 10 bulan belum juga dipublikasikan. Tantangan ini membuat PPPM harus lebih bekerja keras bersama para dosen dan lembaga agar bisa melakukan banyak penelitian dan mengirimkan ke jurnal nasional dan internasional yang bereputasi. Keempat, PPPM sedang berupaya membangun kemitraan atau kerja sama dengan kampus lain, khususnya kampus yang sudah memiliki jurnal nasional terakreditasi.

Target

Selain target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama, PPPM ingin membangun PPPM dengan pondasi yang lebih kokoh. Ke depan, PPPM ingin terus mendukung visi PKN STAN menjadi perguruan tinggi berkelas internasional diiringi dengan penelitan dan pengabdian masyarakat level internasional pula. Lebih jauh, PPPM ingin lebih produktif dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang bisa menghasilkan penerimaan negara (*revenue*). Misalnya dengan melaksanakan penelitian dengan sumber pendanaan dari pihak lain, serta melaksanakan pengabdian masyarakat dengan pendananaan yang bisa menjadi penerimaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) PKN STAN.

Kini, PKN STAN telah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan 21 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, dimana di dalamnya terdapat kerja sama penelitian dan pengabdian masyarakat. “Kami juga bekerja sama dengan Universiti Teknologi Malaysia dan *The University of Queensland*, Australia. Semoga ke depan semakin banyak kerja sama yang dibangun, terutama dalam penelitan dan pengabdian masyarakat. Bekerja sama dengan Pemda terkait penguatan Pengelolaan Keuangan Daerah” ujar Tanda.

Teks Pradany Hayyu



Menebar Manfaat untuk Masyarakat

Rukijo,
Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Hijrah menjadi awal kisah kehidupan keluarga besarnya. Kedua orang tuanya sempat berhijrah dari Klaten di Jawa ke Provinsi Lampung di tanah Sumatera. Harapannya, dengan berpindah dan hidup di Lampung dapat memberikan kesempatan untuk mencari suatu kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut didasari ajaran dalam Islam yang mengajarkan hakikat hijrah untuk menuju ke tempat/keadaan yang lebih baik. Pengalaman hidup dan tempaan kondisi yang ada membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat yang berhijrah ke Lampung dapat dikatakan berhasil. Cerita yang penuh perjuangan tersebut menjadi pembentuk karakter sosok dari Rukijo, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sejak kecil, orang tuanya *menggembleng* dirinya agar dalam bekerja selalu menggunakan kemampuan, waktu dan konsentrasi yang maksimal. Menurutnya, hal itu akan menjadi suatu nikmat batin yang luar biasa apabila dilakukan dengan ikhlas. Kerja ikhlas tanpa mengoptimalkan kemampuan pun juga tidak akan meraih hasil yang optimal. Pesan lain dari orang tuanya adalah agar bekerja untuk memberikan manfaat bagi banyak orang sehingga bekerja tidak hanya untuk memperoleh nafkah, tetapi juga untuk mendapatkan kenikmatan batin.

Ia merasa beruntung dapat bekerja di DJPK Kemenkeu. Dengan begitu, ia memiliki banyak peluang untuk dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat secara luas melalui formulasi kebijakan yang dikeluarkannya. “Kalau formulasinya kebijakannya tepat, *kan* yang menikmati bukan hanya masyarakat di satu atau dua wilayah, tapi di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi bagian dari apa yang saya lakukan berdasarkan bekal dari orang tua tadi”, ceritanya dengan penuh semangat. Pesan turun temurun dari orang tuanya tersebut selalu memotivasi Rukijo dalam bekerja sehari-hari.



Foto
Anas Nur Huda

Membangun daerah dan desa

Pertama kali berkarier di Kemenkeu pada tahun 1993 di Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Rukijo ikut serta dalam perubahan dan penajaman fungsi di dalam organisasinya. Pada tahun 2001, ia turut berpindah ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan yang akhirnya berpisah menjadi Direktorat Jenderal Anggaran dan DJPK, tempatnya bekerja saat ini. Di DJPK, ia pernah menjabat sebagai Direktur Dana Perimbangan yang mengelola dana transfer ke daerah mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan transfer dan evaluasi. Yang menjadi tantangan saat itu adalah adanya beban kerja tambahan dari Dana Desa yang harus ia kelola sejak 2015. Karena merupakan hal yang benar-benar baru, pengelolaan Dana Desa terutama saat pengalokasiannya memerlukan banyak data yang harus dipersiapkan, yakni mengenai jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan indeks kesulitan geografis desa. Hampir enam puluh persen waktu dan perhatiannya dihabiskan untuk mengelola Dana Desa. Padahal waktu itu, Dana Desa hanya sebagian kecil dana yang dikelolanya selain dana transfer ke daerah lainnya.

Tak patah semangat, ia berusaha menjalin koordinasi yang kuat dengan K/L terkait untuk menyiapkan dan membangun *database* yang akurat, yaitu dengan Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS) dan TNP2K. Ia sangat menyadari bahwa pada awal pelaksanaan Undang-Undang Desa, data merupakan masalah krusial dalam formulasi pengalokasian Dana Desa. Selain itu, ia juga harus bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lainnya, seperti Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Membangun integritas

Jumlah pegawai DJPK yang tidak sebanding dengan jumlah wilayah yang harus ditangani tidak menyurutkan

semangat Rukijo untuk bekerja secara optimal. Selain itu, tugas dan fungsi di DJPK yang langsung bersentuhan dengan anggaran di daerah juga menuntut integritas yang tinggi dari para pegawainya. Integritas ini adalah kunci dari sisi bagaimana para pegawai membangun kompetensinya pada saat bekerja. “Artinya, semua pegawai harus punya integritas. Jangan sampai nanti ada pegawai yang karena pemerintah daerah ingin dapat dana yang besar atau ingin dananya segera dapat dicairkan, pegawai tersebut melanggar aturan dan mencederai institusi DJPK. Karena semua sudah ada aturan mainnya”, jelasnya.

Ia selalu berusaha memberikan aturan tegas dan pemahaman kepada para pegawainya untuk selalu menjaga integritasnya. Misalnya, dengan tidak menerima barang atau parsel apapun dari pemerintah daerah yang datang. Berkat kerja keras dan integritas dari para pegawainya, DJPK akhirnya berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada tahun 2015. Selain itu, ia juga berusaha membumikan nilai integritas kepada pegawai baru melalui pembekalan tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Bermanfaat bagi masyarakat

Orang tua adalah pahlawan bagi Rukijo. Meski tidak memiliki pendidikan tinggi, ayahnya, Pawiro Sugito, dan ibunya, Sriyati, merupakan sosok pekerja keras dan bertanggung jawab. Meskipun masa itu menjadi pedagang merupakan pekerjaan yang sulit, namun kedua orang tuanya ikhlas menjalaninya semata-mata agar mampu membiayai pendidikan ketujuh anak-anaknya. Jerih payah keringat kedua orang tuanya tersebut pun memotivasi dirinya dan saudara-saudaranya untuk bisa lebih berhasil dan lebih baik lagi.

Ayahnya banyak mengajari arti dari nilai ‘memberi’. Waktu kecil, ayahnya selalu rajin menanam berbagai macam

sayuran dan buah-buahan dengan niat bukan hanya untuk dinikmati oleh keluarganya sendiri, tetapi juga diniatkan agar bisa dinikmati oleh siapa saja, termasuk para tetangga. Sedangkan ibunya adalah seorang sosok pekerja keras dan ulet. Sifat itulah yang dijadikan panutan oleh dirinya.

Rukijo sendiri mengimpelementasikan nilai yang sama dalam bermasyarakat di lingkungannya. Sebagai contoh, saat terpilih menjabat sebagai ketua rukun tangga (RT), ia selalu mengabdikan dirinya untuk memajukan lingkungannya. Ia merintis dan memberikan contoh pengelolaan limbah sampah terpadu yang merupakan hasil swadaya dari masyarakat. “Semuanya mandiri. Mulai iuran, bikin tempat pengolahan, beli mesin sampai merekrut pegawai dan memberi upah serta sampai penjualan hasil pengolahan sampah pun ada” jelasnya.

Komunikasi keluarga

Meski sibuk untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat, Rukijo tidak melupakan untuk menjaga komunikasi dengan istrinya, Diyah Fayanthie, dan kedua anaknya, Rafid Fawwaz Fadhal dan Raissa Maulida Fadhal. Ia selalu menemani anak-anaknya untuk melakukan hobi mereka di saat libur, seperti kegiatan *travelling*, memancing, maupun bermain basket. Kalau pun ia tidak sempat menemani, istrinya akan menggantikan dirinya untuk mengawasi kegiatan anak-anaknya.

Selain itu, ia juga memanfaatkan sarana komunikasi untuk memantau perkembangan anak-anaknya. Ia sering menanyakan kondisi sekolah dan kesulitan yang dihadapi anak-anaknya di waktu pagi dan sore hari. Ia bersyukur istri dan anak-anaknya dapat memahami pekerjaannya dan memberikan dukungan penuh kepada dirinya. “Yang jelas istri dan anak-anak sudah memahami. Termasuk apabila saya harus bekerja di rumah di hari Sabtu dan Minggu untuk menyelesaikan

pekerjaan kantor. Atau apabila kadang-kadang mendadak saya harus ke kantor di hari libur”, ceritanya.

Harapan

Secara institusi, Rukijo memiliki harapan besar terhadap institusinya. Dengan dinamika dari daerah yang semakin berkembang baik dari segi jumlah, fenomena permasalahan, serta kebutuhan masyarakatnya, ia merasa kebutuhan layanan masyarakat di daerah juga akan terus semakin besar. Untuk itu, ia berharap dapat merealisasikan rencananya dalam membangun *center of excellence* yang memiliki 4 cakupan. Pertama, pusat riset dan analisis untuk melakukan riset terkait dampak kebijakan transfer terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta kinerja keuangan dan pembangunan daerah. Tujuannya antara lain, apabila setelah dianalisis dan hasilnya baik, maka dapat dijadikan *prototype* atau *benchmark* pembelajaran bagi daerah yang lain. Yang kedua, adalah pusat formulasi kebijakan, ketiga adalah pusat data dan informasi, dan yang terakhir adalah pusat pengembangan kompetensi. Untuk saat ini, sedang dirintis pengembangan kompetensi SDM Pemda, seperti bimbingan teknis, program *internship*, pembelajaran *e-learning* dan pengadaan jabatan fungsional.

Sementara itu, untuk dirinya sendiri ia berharap agar dapat segera menyelesaikan disertasinya tentang hubungan kebijakan desentralisasi dan daya saing daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan di Universitas Padjadjaran. Ia ingin agar hasil penelitiannya dapat memberikan semangat dan motivasi kepada para pegawainya untuk terus belajar. “Tidak akan pernah cukup ilmunya bagi kita untuk bekerja kalau kita tidak terus meng-*update* ilmu dan pengetahuan tadi”, jelasnya.

Teks Abdul Aziz

Perekonomian Butuh Lebih Banyak Sentimen Positif

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mengalami 'new normal'



Bulan Ramadhan mendorong peningkatan konsumsi makanan dan minuman sehingga konsumsi rumah tangga tumbuh positif

Foto
Anas Nur Huda

Meski relatif stabil dibandingkan kuartal sebelumnya, akan tetapi pertumbuhan ekonomi cenderung menurun dibandingkan periode sebelumnya. Di tengah masih terdapatnya ketidakpastian perekonomian global, Indonesia membutuhkan penggerak ekonomi yang lebih stabil guna meningkatkan kinerja perekonomian ke depan.

Kinerja Perekonomian Riil Terjaga

Optimisme terhadap kecepatan pemulihan perekonomian yang muncul sejak April 2017 berlanjut hingga akhir kuartal kedua 2017. World Economic Forum tidak mengubah proyeksi pertumbuhan perekonomian global, sehingga tetap berada di tingkat 3,5 persen (yoy) di tahun 2017. Apabila dilihat dari data per negara, terjadi sedikit keberagaman optimisme dimana proyeksi Amerika Serikat dan *emerging market* (EM) diturunkan, sedangkan Jepang, Eropa, dan Tiongkok dinaikkan. Meskipun terdapat keberagaman, secara umum indikator ekonomi global dengan frekuensi tinggi, seperti perdagangan, menunjukkan performa yang positif.

Di tengah ekspektasi penurunan pertumbuhan ekonomi EM, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga meskipun berada di bawah ekspektasi beberapa lembaga seperti Bank Indonesia (BI). Hal ini terutama ditopang oleh konsumsi dan investasi. Berdasarkan siaran pers Badan Pusat Statistik (BPS), pada akhir kuartal kedua tahun 2017 perekonomian Indonesia tumbuh di tingkat 5,01 persen (yoy). Jumlah ini sama dengan kuartal sebelumnya, tetapi lebih rendah dari kuartal II 2016.

Berdasarkan jenis pengeluaran, yaitu konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT), konsumsi pemerintah, investasi, serta nilai ekspor bersih, PDB kuartal II 2017 dipengaruhi terutama oleh meningkatnya kinerja investasi

yang tumbuh dari 4,78 persen pada kuartal sebelumnya menjadi 5,35 persen (yoy). Penguatan kerja investasi didukung oleh pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Diantaranya ditandai dengan realisasi belanja modal pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 yang dialokasikan sekitar 10 persen untuk investasi infrastruktur.

Selain investasi, konsumsi rumah tangga juga bertumbuh positif. Komponen konsumsi RT dan LNPRT meningkat menuju 4,95 persen dari kuartal sebelumnya sebesar 4,94 persen (yoy). Konsumsi rumah tangga relatif baik. Salah satunya disebabkan keberadaan bulan Ramadhan yang mendorong peningkatan konsumsi makanan dan minuman.

Namun demikian, kinerja konsumsi secara umum masih dibatasi antara lain oleh penjualan ritel dan kendaraan yang belum solid, perkembangan upah yang tumbuh terbatas, serta pertumbuhan lapangan kerja, baik formal maupun informal yang sedikit melambat. Di sisi lain, menurut indikasi BI yang berdasarkan data perilaku konsumen terhadap promo, RT menengah ke atas juga cenderung melakukan penyesuaian konsumsi (*consumption smoothing*) dengan meningkatkan tabungan, sehingga konsumsi lebih rasional.

Indikator lainnya seperti konsumsi Pemerintah dan nilai ekspor bersih mengalami penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya. Konsumsi Pemerintah bahkan tumbuh negatif sebesar sebesar minus 1,93 persen, menurun dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 2,68 persen (yoy). Sementara nilai ekspor bersih di kuartal kedua 2017 bertumbuh positif sebesar 2,81 persen, sedikit menurun dari kuartal sebelumnya sebesar 3,09 persen (yoy).

Sumbangan Investasi Mulai Stabil

Selain pertumbuhan investasi yang meningkat pada bulan ini semenjak 2016, sumbangan investasi terhadap PDB di kuartal II 2017 juga meningkat menuju 1,69 persen dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 1,53 persen. Hal ini menjadi sinyal mulai stabilnya potensi stabilitas investasi sebagai penggerak perekonomian.

Meningkatnya kontribusi pertumbuhan dari investasi, sedikit banyak merupakan hasil dari perbaikan kelayakan investasi Indonesia yang diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor's (S&P), yang turut melengkapi dua *rating* layak investasi dari Fitch dan Moody's.

Peningkatan kinerja investasi terhadap PDB juga senada dengan data investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM mencatatkan nilai investasi pada kuartal II 2017 yang tumbuh 12,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, akumulasi investasi semester I 2017 mencapai hampir 50 persen dari target.

Pada pasar keuangan, penciptaan investasi baru juga meningkat. Total penerbitan obligasi korporasi selama 2017



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

”

Komentar Pakar



Prof. Dr. Ari Kuncoro,
Universitas Indonesia

mencapai Rp79,2 triliun atau tumbuh sebesar 37 persen dibandingkan 2016. Sementara di pasar saham, pertumbuhan kapitalisasi pasar pada akhir Juli 2017 juga tumbuh sebesar 13,9 persen (yoy), meningkat dibandingkan akhir Juli 2016.

Dibutuhkan Sentimen Positif Lebih Lanjut

Di tengah berkurangnya ketidakpastian perekonomian global, antisipasi risiko kenaikan suku bunga acuan global lanjutan masih membayangi pasar keuangan domestik. Akibatnya, sentimen positif lebih lanjut dibutuhkan.

Meskipun di bulan Juli the Fed mempertahankan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) pada kisaran 1 hingga 1,25 persen. Investor masih mengantisipasi kenaikan FFR lanjutan di 2017 serta mewaspadai dampak program normalisasi neraca the Fed.

Merespons tren yang secara umum meningkat, *yield* SUN tenor 10 tahun mengalami sedikit kenaikan di bulan Juli meskipun secara umum berada dalam tren penurunan. Selain *yield*, arus modal asing (*inflow*) ke pasar SUN di bulan Juli juga menurun, demikian pula dengan saham. Selain itu, berdasarkan data Bloomberg, Rupiah juga sedikit melemah di bulan Juli 2017 yaitu sebesar 0,19 persen (*mtm*) menuju Rp13.325 per dolar AS. Neraca perdagangan juga mengalami sedikit defisit di kuartal kedua 2017.

Secara tahunan, indikator-indikator pasar keuangan tersebut masih tergolong positif. Dengan demikian, di tengah laju inflasi yang stabil bahkan menurun ke tingkat 3,88 persen (yoy), serta pertumbuhan PDB yang terjaga, suku bunga acuan BI dapat dipertahankan pada tingkat 4,75 persen.

Walaupun masih cenderung positif, menurunnya *inflow* merupakan indikasi dibutuhkannya sentimen positif lebih lanjut guna meningkatkan kinerja perekonomian. Stabilitas makroekonomi, efektivitas kebijakan ekonomi, serta realisasi pembangunan infrastruktur diharapkan dapat terus menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang baik. Sementara di sektor keuangan, terobosan inisiatif seperti investasi infrastruktur inovatif melalui Efek Beragun Aset diharapkan dapat menjadi katalis untuk meningkatkan penciptaan investasi di pasar modal.

Teks Adelia Pratiwi
Pegawai Badan Kebijakan Fiskal

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kuartal I tahun 2011, terutama mulai akhir periode meningkat pesatnya harga komoditas global (*commodity boom*) pada kuartal II 2012, mengalami “*new normal*” dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar rata-rata 5 persen.

Ke depannya, dinamika pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh konsumsi rumah tangga (RT). Selain karena proporsinya yang besar, sejak akhir dari *commodity boom* di kuartal II 2012, konsumsi RT selalu tinggi dan stabil dalam menopang PDB. Hal ini terutama tercermin dari makanan dan minuman sebagai pemegang proporsi terbesar terhadap total konsumsi yang selalu stabil bahkan meningkat dalam periode ini.

Selanjutnya, konsumsi RT ke depan diperkirakan juga masih menjadi komponen penting. Hal ini mengacu diantaranya pada tren data rata-rata upah harian pekerjaan utama yang meningkat, menurunnya presentase penduduk yang putus asa dalam mencari pekerjaan, serta partisipasi angkatan kerja yang semakin tinggi dalam mengkompensasi stagnasi pendapatan riil dengan menambah pendapatan keluarga.

Meskipun investasi cukup potensial dan memiliki porsi yang besar, dibutuhkan *sustained growth* yang signifikan dari investasi. Hal ini dilihat dari adanya fluktuasi besaran investasi selama periode 2011 hingga saat ini. Sementara itu, momentum ekspor juga belum cukup untuk mendukung perekonomian. Hal ini terlihat dari menurunnya tren ekspor selama periode tersebut. Selain itu, konsumsi pemerintah dan pertumbuhan PDB juga terlihat mengalami *decoupling*.

JANGAN TERTIPU

DENGAN YANG **PALSU**



PITA CUKAI PALSU

Pita cukai yang **TIDAK RESMI** sebagai tanda pelunasan cukai hasil tembakau (rokok)
(melanggar Undang Undang Cukai)

**Bila Anda menemukan rokok dengan pita cukai yang terindikasi PALSU
Segera Laporkan ke KANTOR BEA CUKAI terdekat atau hubungi**

Contact Center BRAVO BEA CUKAI **1500 225**

Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh



Daya Saing Infrastruktur Indonesia di Kancan ASEAN

Teks Tri Wibowo

Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan *)

Dengan diberlakukannya Asean Economy Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia memasuki babak baru kerjasama perdagangan bebas dengan negara tetangga. MEA diharapkan mampu menciptakan suatu kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi. Di samping pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, adanya integrasi ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN diharapkan akan mampu membuka akses pasar yang lebih besar, mendorong terjadinya efisiensi, dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.

Indonesia yang sedang memasuki deviden demografi, mempunyai peluang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada 2010 saja, dari total 596,7 juta jiwa penduduk Asean, sebanyak 241,6 juta jiwa atau 40,49 persennya berasal dari Indonesia. Sementara pada 2016, jumlah penduduk Indonesia mencapai 260,6 juta jiwa atau 40,68 persen dari total 640,6 juta jiwa penduduk Asean. Peningkatan penduduk Indonesia di kawasan Asean bukan hanya dari sisi jumlah, melainkan juga kontribusinya.

Namun dari ekonomi, kontribusi Indonesia di kawasan Asean selama 5 tahun terakhir justru menunjukkan penurunan. Pada 2010, dari total PDB Asean sebesar USD1980 miliar, Indonesia berkontribusi sebesar USD755 miliar atau 38,1 persen. Sementara pada 2015, dari peningkatan PDB Asean menjadi USD2440 Miliar, Indonesia hanya berkontribusi sebesar USD861 miliar atau turun menjadi 35,3 persen.

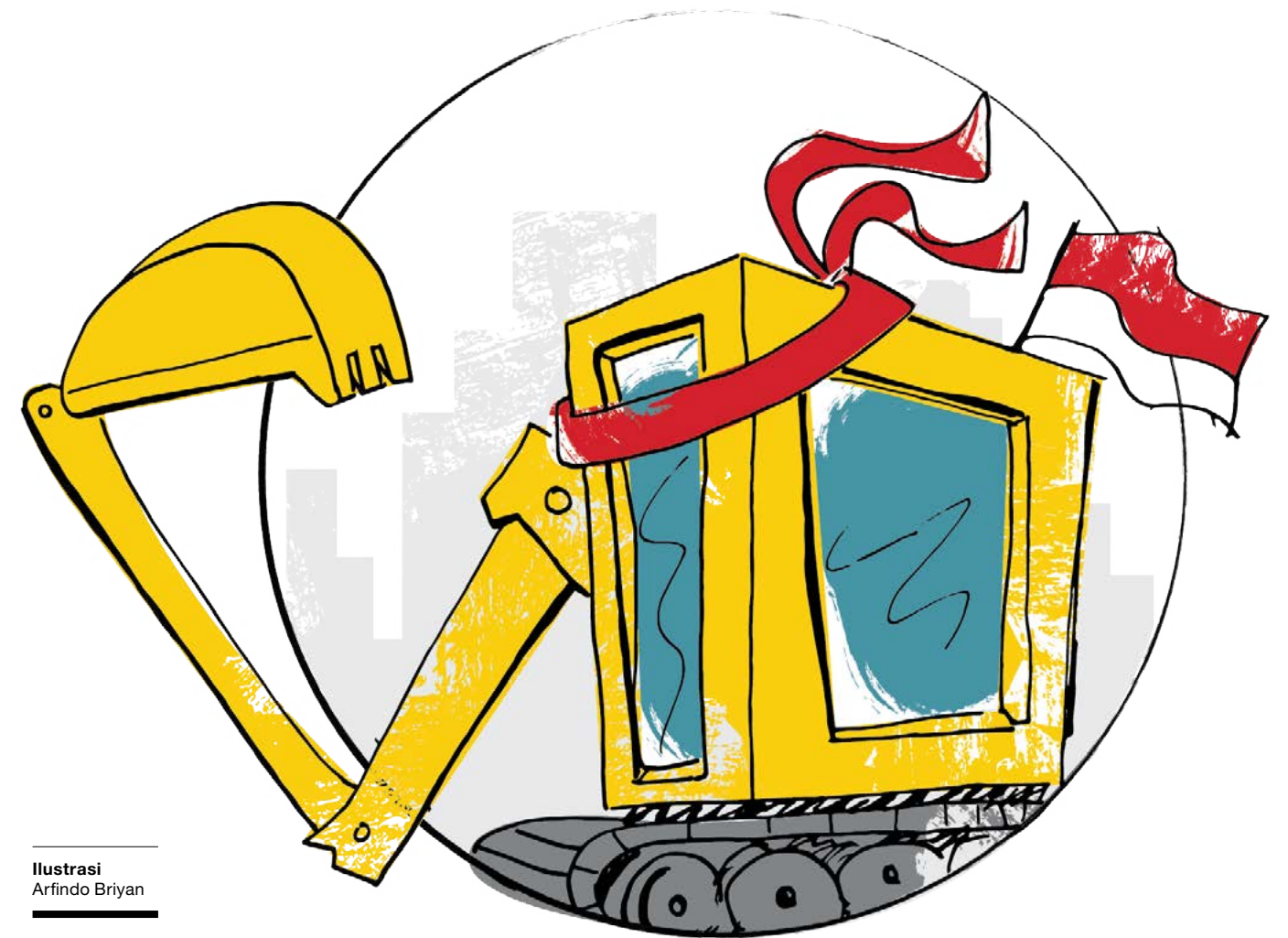
Selanjutnya pada 2010, pendapatan per kapita Indonesia mencapai USD3125 atau sebesar 94,2 persen dari pendapatan perkapita Asean yang sebesar USD3319. Sementara pada 2015, pendapatan per kapita Indonesia naik menjadi USD3347, atau sebesar 86,8 persen dari pendapatan perkapita Asean sebesar USD3853. Meski secara nominal pendapatan perkapita Indonesia dalam 5 tahun mengalami kenaikan. Namun, secara relatif mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita Asean.

Salah satu faktor penting agar Indonesia mampu bersaing, khususnya di kawasan Asean adalah ketersediaan infrastruktur yang andal. Hal ini menjadi faktor penting dalam aktivitas perekonomian, sebab ketersediaan

infrastruktur yang baik akan mampu mengurangi “efek jarak” antar daerah, mempermudah terbentuknya pasar nasional yang terintegrasi, mengefisiensi biaya, serta memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, maupun mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.

Sebagaimana diketahui, memasuki masa perdagangan antarkawasan Asean, tantangan persaingan yang dihadapi Indonesia tidak hanya terbatas dari dalam negeri, tetapi juga dengan sesama negara anggota ASEAN. Saat ini, kinerja ekspor Indonesia menempati peringkat ke-4, berada dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Sementara dari sisi impor, Indonesia menempati urutan ke-3 tertinggi setelah Singapura dan Malaysia. Hal ini berakibat pada defisit necara perdagangan Indonesia terhadap beberapa negara ASEAN.

Sementara dari sisi peluang, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk hingga 40 persen dari total penduduk Asean bisa menjadi modal utama dalam merebut kue ekonomi pendapatan domestik bruto Asean yang besarnya mencapai USD2,4 triliun. Penetrasi beragam produk Indonesia diharapkan bisa menguasai pasar di



Ilustrasi
Arfindo Briyan

kawasan ASEAN. Namun, apabila Indonesia tidak siap, justru produk-produk dari negara ASEAN lainnya yang akan menyerbu pasar Indonesia. Maka, salah satu upaya untuk mengubah tantangan menjadi peluang adalah dengan memperbaiki daya saing Indonesia.

Daya Saing Infrastruktur Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep daya saing muncul sebagai paradigma baru dalam pembangunan ekonomi. Pengetahuan mengenai posisi daya saing akan memberi gambaran terkait peluang dan tantangan yang dihadapi dalam persaingan global. Daya saing suatu negara sangat erat kaitannya dengan produktivitas negara tersebut.

Melalui institusi dan kebijakan yang kredibel dan didukung oleh efisiensi dalam penggunaan anggaran, diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Salah satu faktor utama dalam upaya meningkatkan daya saing global adalah perbaikan kualitas infrastruktur. Terdapat korelasi positif antara kualitas infrastruktur dengan daya saing. Semakin baik kualitas infrastruktur suatu negara, maka akan semakin tinggi daya saingnya. Indikator utama kualitas infrastruktur ini bisa dilihat dari kualitas transportasi darat, ketersediaan pelabuhan, dan kelistrikan.

Peringkat infratraktur Indonesia selama 5 tahun terakhir telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagaimana

dilaporkan *World Economic Forum* dalam penyusunan *Global Competitiveness Index* (GCI), peringkat infrastruktur Indonesia pada tahun 2012-2013 berada pada posisi 78, atau naik 18 peringkat menjadi posisi 60 di tahun 2016-2017. Membaiknya peringkat kualitas infrastruktur ini didorong oleh peningkatan anggaran infrastuktur beberapa tahun terakhir. Walaupun mengalami peningkatan, akan tetapi peringkat kualitas infrastruktur Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura (1), Malaysia (24) dan Thailand (49). Namun Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan Vietnam (79) dan Philipina (95).

Dari komponen infrastruktur, Indonesia lemah pada infrastruktur

listrik. Peringkat listrik Indonesia menempati urutan ke-89, hanya lebih baik dibandingkan Philipina yang menempati peringkat 94. Salah satu penyebab adalah rendahnya rasio elektrifikasi Indonesia. Pada 2016, rasio elektrifikasi Indonesia baru mencapai 88,3 persen. Sementara sejumlah negara tetangga seperti Singapura 100 persen, Malaysia 99 persen, Thailand 99,3 persen, Vietnam 98 persen, dan Brunai 99,7 persen. Data BPS (podes) pada 2014 juga mencatat terdapat 2.519 desa yang belum teraliri listrik.

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, distribusi penduduk yang tidak merata, serta medan geografis yang sulit aksesnya, menjadi penyebab banyaknya desa di wilayah Indonesia Bagian Timur yang belum menerima aliran listrik. Terkait hal ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi melalui pembangunan sejumlah pembangkit listrik, khususnya untuk daerah terpencil, seperti listrik tenaga surya dan mikrohidro.

Meskipun belum maksimal, rasio elektrifikasi khususnya wilayah Indonesia Bagian Timur telah menunjukkan peningkatan. Untuk wilayah Maluku dan Papua, rasio elektrifikasi pada daerah perkotaannya telah meningkat dari 95,2 persen pada 2010, menjadi 98,95 persen pada 2015. Sementara pada periode yang sama, rasio elektrifikasi daerah perdesaan secara rata-rata juga meningkat, dari 59,8 persen menjadi 71,5 persen. Pemerintah terus berupaya meningkatkan elektrifikasi melalui kegiatan listrik perdesaan. Bahkan pada 2017 ini, rasio elektrifikasi Indonesia ditargetkan bisa mencapai 92,75 persen.

Dalam hal infrastruktur jalan dan pelabuhan, Indonesia menempati peringkat ke-75, lebih unggul dibanding Vietnam dan Philipina, tetapi masih di bawah Singapura,

Malaysia, dan Thailand. Komponen terbaik infrastruktur Indonesia adalah kereta api yang menempati peringkat ke-39, sementara Malaysia di posisi ke-15 dan Singapura di posisi ke-5. Pembangunan *double track* untuk KRL Cikarang-Manggarai, MRT, LRT, serta kereta menuju bandara, akan semakin meningkatkan daya saing infrastruktur kereta api Indonesia.

Terkait hal ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebagai prioritas yang tinggi. Sejak 2015, anggaran pembangunan infrastruktur telah meningkat secara signifikan. Kebijakan realokasi anggaran hasil dari kebijakan penghapusan subsidi BBM, sebagian besar telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Keseriusan pembangunan infrastruktur Indonesia juga ditegaskan Presiden Joko Widodo dihadapan para CEO dan pengusaha dari Korea Selatan dalam kunjungan kenegaraan di Korea Selatan pada 2016 lalu. Disampaikan Presiden, bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur merupakan strategi pemerintah dalam menstabilkan perekonomian dan pemerataan pembangunan. "Pemerintahan kami meluncurkan program pembangunan infrastruktur terbesar dalam sejarah negeri kami," papar Jokowi sebagaimana dikutip dalam laman resmi Kementerian Sekretariat Negara (16/05/2017).

Dalam paparannya, pembangunan infrastruktur Indonesia meliputi pengembangan pembangkit listrik 35 megawatt, pembangunan 163 pelabuhan, pembukaan 1646 mil jalan, pembangunan 621 mil jalan tol, 2024 mil rel kereta api, 15 bandara, serta 49 bendungan dan sistem irigasi untuk 1 juta hektar lahan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan semakin meningkatkan peringkat

infrastruktur Indonesia di kawasan Asean yang pada akhirnya berdampak positif dalam meningkatkan daya saing Indonesia khususnya di kawasan Asean.

Penutup

Sebagai negara yang menguasai 40 persen jumlah penduduk ASEAN, Indonesia menjadi pasar potensial untuk aliran masuk barang, jasa, dan tenaga kerja bagi negara lainnya di ASEAN. Peluang Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara tetangga juga cukup lebar karena besarnya skala ekonomi Indonesia yang didukung oleh proporsi penduduk usia produktif dan pertumbuhan kelas menengah. Lingkungan makro ekonomi Indonesia yang relatif terjaga, didukung dengan membaiknya infrastruktur akan menjadi dukungan positif dalam memperkuat daya saing Indonesia.

Pemerintah terus berusaha meningkatkan anggaran infrastruktur dengan pelebaran ruang fiskal melalui peningkatan *tax ratio*, efisiensi belanja nonprioritas serta pengembangan *creative financing*. Selain itu, pengembangan pembiayaan infrastruktur perlu dilakukan dengan mendorong peran serta pemerintah daerah, swasta, dan BUMN. Sementara perbaikan kualitas infrastruktur perlu didukung semua *stakeholders* secara konsisten, menyeluruh dan berkesinambungan. Sebab, dengan membaiknya kualitas infrastruktur akan meningkatkan akses dan kemudahan bisnis bagi semua pihak yang pada akhirnya mampu mendorong daya saing Indonesia di kancah persaingan global.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan



LKPP 2016 WTP

LKPP

atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

LKPP yang disusun merupakan gabungan (konsolidasian) dari seluruh LKKL dan LKBUN.

LKKL



Merupakan gabungan (konsolidasian) dari seluruh Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) di Indonesia. Pada tahun 2016 terdiri dari gabungan 87 LKKL.

LKBUN



Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) merupakan gabungan (konsolidasian) dari seluruh Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN (BA- BUN), yakni BA-BUN Pengelolaan Utang, Pengelolaan Hibah, Pengelolaan Investasi Pemerintah, Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Pengelolaan Transfer ke Daerah & Dana Desa, Pengelolaan Belanja Subsidi, Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Pengelolaan Transaksi Khusus.

Opini Audit WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini audit terbaik dan yang pertama kali dicapai oleh Pemerintah selama 12 tahun semenjak pertama kali LKPP disusun dan diaudit oleh BPK.



Cerita Generasi Pertama Penerima Beasiswa

Arip Muttaqien adalah satu dari 60 orang generasi pertama penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pada 2013, Arip—biasa dia disapa—berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi. Hingga saat ini, Arip masih merampungkan pendidikan doktoral bidang Innovation, Economics and Governance for Development (IEGD) di Maastricht University. Maastricht adalah kota di ujung selatan Belanda, tepatnya di perbatasan Belanda, Belgia, dan Jerman.

Arip mendaftar program beasiswa LPDP ketika lembaga itu belum lama berdiri. Lewat beasiswa LPDP, dia berniat memperoleh kualitas pendidikan yang lebih baik dan jejaring yang lebih luas. “Niat saya juga ingin mencari pengalaman hidup melalui interaksi dengan orang-orang dari beragam bangsa dan penduduk lokal di Belanda,” kata Arip.

Skema pendanaan beasiswa yang berasal dari pemerintah menjadi alasan utama ketertarikan Arip mendaftar beasiswa LPDP. “Saya melihat beasiswa LPDP berpeluang hadir dengan skema lebih baik ke depan. Beasiswa pemerintah yang ada pada saat itu, terkesan selalu terlambat pencairan dananya, sehingga

mahasiswa harus *nombok* dulu,” ujar lulusan Program Master dari Toulouse School of Economics tahun 2010 dengan beasiswa dari Pemerintah Perancis itu.

Kehadiran LPDP memiliki daya tarik karena berbentuk Badan Layanan Umum. “Saya merasa ada yang berbeda antara LPDP dengan beasiswa-beasiswa dari pemerintah sebelumnya,” katanya lagi. Ketika mengikuti proses seleksi LPDP, Arip telah mengantongi *Letter of Acceptance* (LoA) dari kampus pilihannya. Selanjutnya, Arip mencari lembaga sponsor untuk membiayai studinya.

Ketika seorang kawan memberikan informasi soal LPDP, dia tertarik mencoba. “Saya mendaftar ketika LPDP belum terlalu gencar melakukan publikasi dan dikenal orang,” kata Arip yang menamatkan studi S1 Jurusan Teknik Industri, Universitas Indonesia (UI) pada 2007 melalui sejumlah program beasiswa.

Sebagai generasi pertama, Arip masih ingat betul proses seleksi LPDP empat tahun silam. Pengumpulan aplikasi pendaftaran dan dokumen administrasi secara *online* di lakukan pada akhir Maret 2013. Sebulan berselang, Arip dipanggil untuk mengikuti wawancara.

“Saya datang ke gedung LPDP di kawasan Lapangan Banteng. Di sana saya

melihat beberapa *interview* dilaksanakan lewat Skype karena peserta seleksi masih tinggal di luar negeri. Sekarang, proses wawancara sudah tidak bisa melalui aplikasi itu,” ujar Runner Up Mahasiswa Berprestasi UI 2007 itu.

Setelah dinyatakan lulus seleksi, Arip diwajibkan mengikuti Persiapan Keberangkatan (PK). Angkatan pertama PK berjumlah 60 orang untuk tujuan studi di dalam dan luar negeri. Saat itu, tiket peserta untuk mengikuti PK masih dibiayai LPDP dengan skema *reimburse*, termasuk peserta yang tinggal di luar negeri.

Studi komparasi

Disertasi yang diusung Arip meneliti perbedaan distribusi kesejahteraan (*welfare distribution*) di antara tiga negara Asia, yaitu China, India, dan Indonesia. Faktor penyebab perbedaan dilihat dari struktur demografi, pasar tenaga kerja, penghasilan, tingkat pengeluaran rumah tangga, serta kekayaan yang diukur dari jumlah aset.

“Saya mengambil dua obyek utama, yaitu *inequality* dan *polarization*,” ujar Arip. Khusus untuk *polarization*, faktor ini menjadi hal baru karena penelitian tidak hanya melihat dari sisi *income* atau



Arip selalu mendapatkan beasiswa dalam menempuh studi S1, S2, dan kini S3.

Foto
Dok. Pribadi

expenditure polarization, tetapi juga *socio-economic polarization*. Dengan memasukkan faktor *socio-economic polarization*, interaksi antara *variabel ethnicity* dan *income* atau *expenditure* juga dipertimbangkan.

Arip tertarik mengambil topik disertasi tersebut sejak akhir tahun pertama menempuh program doktoral. “Bagi saya, topik ini menarik karena membandingkan kesejahteraan di tiga negara besar Asia yang masih dalam level negara berkembang dengan total populasi sekitar 40 persen dunia,” ujar Arip.

Menurutnya, ada banyak isu menarik yang bisa diteliti. Misalnya ketika berbicara tentang *global inequality and poverty* di dunia, strategi utamanya dapat berfokus pada China, India, dan Indonesia. “Kalau *problem* di tiga negara tersebut bisa lebih cepat diselesaikan, akan berpengaruh signifikan pada upaya penyelesaian masalah terkait secara global,” kata Ari.

Tantangan

Selama menjalani studi di Belanda, tantangan terbesar secara akademis menurut Arip adalah *academic writing*. “Saya melihat pendidikan *bachelor* di Indonesia tidak semuanya mengajarkan

gaya menulis akademis yang benar,” ujarnya. Saat menulis skripsi, Arip mencontohkan, masih ditemukan skripsi dengan halaman terlalu banyak, penggunaan gaya bahasa basa-basi, dan pengaturan struktur yang terlalu kaku. “Di sini, jumlah halaman bukan yang utama. Yang penting adalah bagaimana *content* dan *concise* yang bisa laku untuk publikasi,” kata koordinator *awardee* LPDP Belanda itu lagi.

Tantangan lain dari studi di luar negeri adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan ritme dan gaya kerja masyarakat setempat. “Orang Belanda cenderung efisien dan tidak mau lembur. Gaya kerja seperti ini sih enak ya,” ujar Arip seraya tergelak. Yang juga menjadi tantangan hidup di luar negeri adalah soal makanan. Arip harus selalu mengecek kandungan bahan makanan sebelum membeli apapun. Di samping itu, kemudahan memperoleh makanan di Indonesia, misalnya dengan ojek atau mengandalkan penjual makanan keliling, tak bisa didapatkan di Belanda. “Masak sendiri jadi jalan keluarnya,” ujar Arip.

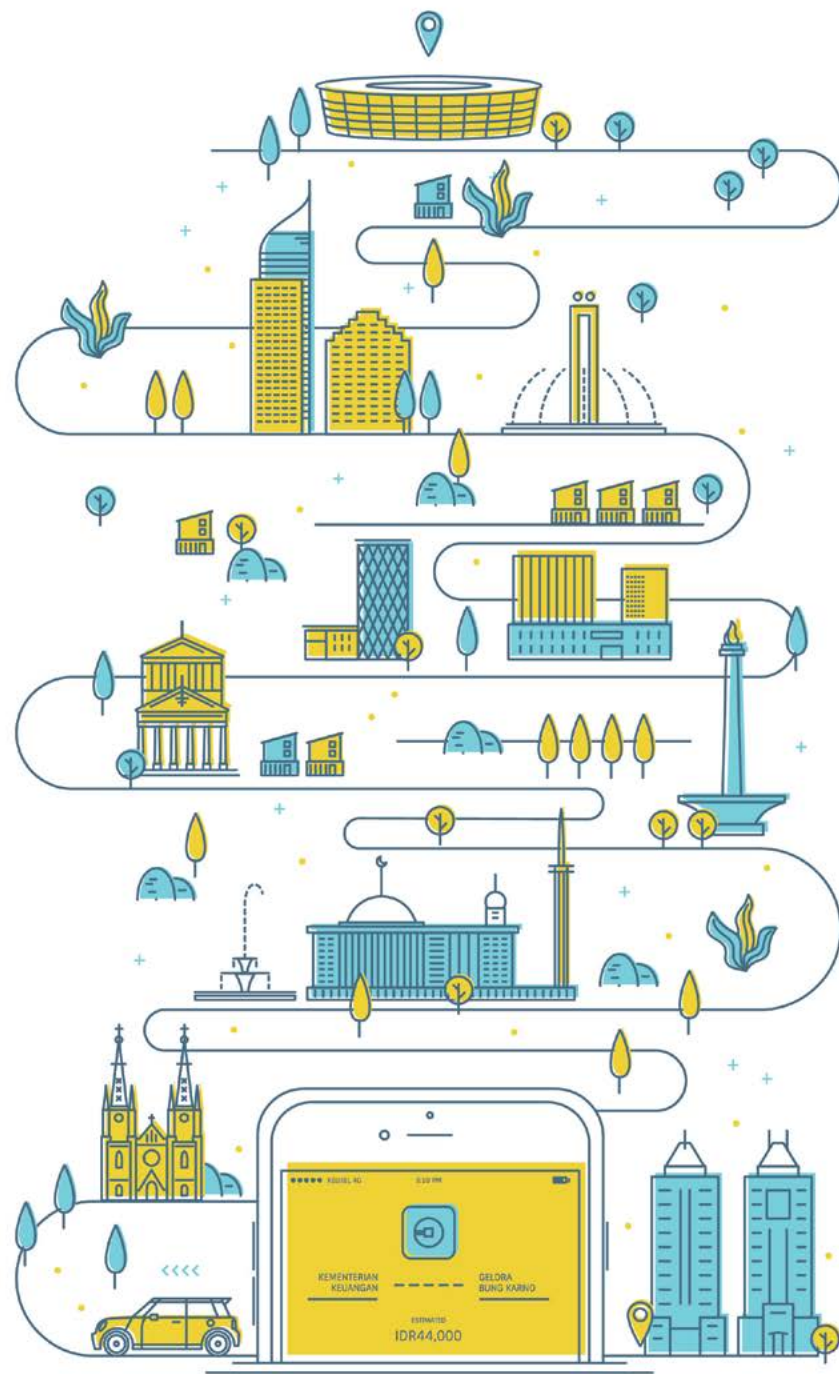
Harapan

Belajar bersama sejumlah mahasiswa dari beragam negara, Arip mengaku kualitas mahasiswa Indonesia cukup bersaing. “Secara kemampuan berbahasa, kita tidak kalah. Yang harus dilatih adalah kemampuan adu argumentasi dan lebih berani di dalam kelas,” kata Arip. Lebih jauh, pendidikan di Indonesia masih cenderung mengajarkan siswa kurang aktif di kelas. Arip berharap mental ini dapat diubah. “*Inferiority complex* adalah penyakit warisan yang harus dibuang jauh-jauh,” ujarnya menambahkan.

Selain berkuliah, Arip sempat aktif dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda. Meskipun memiliki grup komunikasi *awardee* LPDP sendiri, Arip mengatakan bahwa para *awardee* tidak bersikap eksklusif. Mereka tetap membaur dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sana. Arip juga aktif dalam kegiatan pengajian. Sang istri bahkan ikut mengajar mengaji untuk anak-anak Indonesia.

Arip berharap studinya dapat selesai tepat waktu. Saat kembali ke Indonesia, dia ingin memberi sumbangsih kepada masyarakat. “Sumbangsih utama adalah pengalaman dari Belanda yang dapat dibawa ke Indonesia. Misalnya, pembelajaran tentang sistem kesehatan dan *tax-subsidy* yang dijalankan di Belanda,” kata dia. Secara keilmuan, Arip ingin berkontribusi pada pengembangan bidang ekonomi. Terutama melalui *monitoring* serta evaluasi proyek-proyek pembangunan di Indonesia yang terkait dengan pengurangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.

Teks Dwinanda Ardhi



Ilustrasi
Muhammad
Andika Amin

Peran Kemenkeu Dalam Peradaban Uber

Teks Anies Said Basalamah, Kepala Pusdiklat PSDM BPPK

Ilustrasi peradaban Uber penulis ambil dari buku Rhenald Kasali yang berjudul **“Disruption”**. Istilah ini tidak semata berurusan dengan usaha transportasi Uber, tetapi lebih ke pemanfaatan teknologi yang memicu perubahan pola pikir pelaku usaha dan konsumen. Celakanya, regulator dinilai tidak mampu menyediakan aturan baru.

Ciri peradaban Uber ada 5. Pertama, bukan *time series* dan linear melainkan *real time* dan eksponensial. Kedua, ekonomi berbagi. Ketiga, *on demand* atau tersedia saat dibutuhkan. Keempat, pasar berada dalam jaringan komputer. Kelima, Lawan-lawan bisnis tidak terlihat. Sebagian dari seluruh ciri tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ekonomi Berbagi

Meski bergerak di bidang transportasi, Uber tidak memiliki armada sendiri. Uber hanya menjadi perantara pemilik kendaraan dengan penumpang melalui aplikasi. Sebelum menjadi anggota, pemilik kendaraan dan supirnya akan diverifikasi lebih dahulu untuk meningkatkan keamanan.

Model serupa juga terjadi dalam bisnis kapal laut yang mengubah PT. Djakarta Lloyd yang semula rugi ratusan miliar menjadi untung bersih Rp40 miliar pada 2016. Seperti diceritakan Arham S. Torik: “Kalau ada pesanan angkutan barang dari Kalimantan ke Jakarta sementara kapalnya ada di Jakarta, biayanya terlalu mahal. Kami cukup mengontak *shipping line* lain di dekat lokasi karena lebih murah.”

Jika dua cerita di atas menguntungkan pemilik dan pengguna, apa yang terjadi di lingkup Kemenkeu justru sebaliknya. Seorang pengusaha tidak bisa menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena menerapkan ekonomi berbagi berupa alamat kantor bersama (*virtual office*). Padahal pengusaha ini ingin membayar pajak dari penjualan yang dilakukan kantornya.

Dewasa ini banyak pengusaha yang tidak memerlukan ruang kantor resmi. Mereka cukup menyewa kantor-kantor virtual yang menyediakan petugas penghubung dan ruang pertemuan jika diperlukan penyewa. Sudah banyak yang menerapkan model ini di berbagai kawasan bisnis. Penyewa tidak perlu membayar terlalu mahal. Pemilik kantor juga untung karena ruangan yang sama disewakan kepada banyak pihak. Operasional bisnis penyewa bisa dilakukan di mana saja dengan teknologi.

Ketika penulis membantu pengusaha tersebut menghubungi pihak terkait, jawabannya mirip dengan yang dikemukakan Rhenald Kasali, yakni kurang paham realita bisnis masa kini dan terkesan enggan berubah. Akibatnya, pengusaha tersebut kecewa dan berujar “Katanya penerimaan pajak tidak tercapai. Ini mau membayar pajak kok tidak dibolehkan?”

Padahal kalau ditinjau lagi, ia sudah memenuhi syarat untuk menjadi PKP. Ijin usaha dan surat notarisnya lengkap, lokasi kantornya jelas, dan petugasnya ada sesuai jam kerja. Namun ada kekhawatiran kantor virtual berpotensi memunculkan faktur pajak fiktif sehingga pengusaha tersebut tidak bisa menjadi PKP. Akibatnya, kalau mendapatkan pekerjaan dari pemerintahan harus menggunakan ‘bendera’ perusahaan lain. Tentu hal ini menambah biaya, mengurangi laba bersih, dan mengurangi pajak perusahaannya.

Ekonomi On-Demand dan Pasar Virtual

Ciri lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemenkeu juga bisa dilihat pada bisnis bitcoin atau uang digital yang tidak ada wujud fisiknya. Kita tidak dapat memegang atau menyimpannya di dalam dompet.

Nilai bitcoin lebih tinggi dari GBP atau USD. Dari transaksi pembelian pulsa dengan bitcoin yang penulis coba, ternyata nilai 1 bitcoin mencapai USD2.500 jika per dollar dihargai Rp13.300. Kurs per 29 Juni 2017 untuk setiap 1 bitcoin seperti dipublikasikan oleh www.coins.id adalah beli Rp36.337.305 dan jual Rp35.814.700. Artinya nilainya semakin naik.

Jika kita mengetik kata-kata “bisnis bitcoin di Indonesia” pada mesin pencari, baris pertama pencarian akan menghasilkan nama bitcoin.ac.id, sebuah ‘perusahaan’ terbesar dalam bisnis bitcoin. Namun perusahaan ini tidak memerlukan lokasi fisik.

Situs tersebut memberi informasi yang cukup mengejutkan, seperti: “1BTC = Rp35.808.100”, “Kami menerima pembayaran dari semua bank nasional di Indonesia”, “Tukar bitcoin atau aset lain ke rupiah hanya dalam beberapa klik”,

“Uang sampai ke rekening dalam 1 hari kerja”, “Kami beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu”, “349.817 anggota sudah bergabung, tunggu apa lagi?”

Bitcoin.co.id menerima simpanan dalam rupiah dan bitcoin. Seorang anggota akan mentransfer sejumlah dana ke rekening rupiah. Saat membeli bitcoin, saldonya akan dikurangkan dan dipindahkan ke rekening bitcoin. Untuk itu perusahaan ini akan memungut biaya administrasi. Penentuan nilai 1 bitcoin ditentukan berdasarkan lelang. Bitcoin tidak dikontrol oleh lembaga pemerintah manapun.

Berbagai pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Apakah bitcoin.co.id perijinannya melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan? Apakah bitcoin.co.id sudah terdaftar di DJP dan memiliki NPWP? Apakah transaksinya dikenai PPN? Apakah penghasilannya sudah dikenai PPh Badan? Jika bitcoin.co.id benar menerima pembayaran dari semua bank nasional di Indonesia, berdasarkan peraturan yang ada saat ini DJP sudah dapat meminta data dari bank, sehingga harusnya tidak sulit menemukan perusahaan tersebut untuk bersedia membayar pajak.

Memang benar yang dikatakan Rhenald Kasali bahwa para regulator perlu tahu bisnis-bisnis baru yang muncul dalam peradaban Uber. Bukan masanya lagi ‘berburu di kebun binatang’. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menjadi kewajiban agar tidak memunculkan peraturan baru yang kontra produktif dan mengakibatkan bisnis tersebut mati. Dengan begitu, DJP tidak akan kehilangan potensi pajak yang dewasa ini tengah digalakkan dengan sungguh-sungguh.

Agar Lebih Efektif, Aturan Pengelolaan TKDD Diubah

Riviu PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pemerintah melakukan transformasi mekanisme Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) dengan melakukan perubahan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolan TKDD, yang mengatur mengenai mekanisme, pengalokasian, penyaluran dan pelaporan transfer pemerintah pusat ke daerah. Transformasi ini dilakukan untuk dapat menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana TKDD, sehingga *output* yang diharapkan dapat tercapai.

Serapan Rendah, Penyampaian Persyaratan DAK Fisik Diperpanjang

Hasil evaluasi memperlihatkan adanya beberapa kendala pada penerapan PMK Nomor 50/PMK.07/2017, khususnya kendala batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Di dalam PMK disebutkan bahwa batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik triwulan II adalah paling lambat tanggal 21 Juli 2017. Jika penyampaian melebihi tanggal tersebut, maka penyaluran DAK Fisik triwulan berikutnya tidak akan disalurkan.

Berdasarkan data, realisasi penyaluran DAK Fisik triwulan II per tanggal 19 Juli 2017 hanya mencapai 2,66 persen dari total pagu penyaluran triwulan II TA 2017 atau sebesar Rp387.3 miliar. Rendahnya penyerapan penyaluran dana tersebut disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016. Perubahan nomenklatur organisasi tentu menyebabkan perubahan organisasi pelaksana penyalur DAK Fisik. Selain itu, rendahnya penyerapan penyaluran dana juga disebabkan karena adanya permasalahan pengadaan barang/jasa, seperti keterlambatan proses lelang, gagal lelang dan keterlambatan pengadaan barang melalui *e-catalogue*. Tidak hanya itu, kondisi cuaca dan permasalahan lainnya yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di daerah juga menjadi penyebab rendahnya penyerapan dana.

Melihat kondisi ini, beberapa kementerian teknis pengampu DAK Fisik, DPR RI, asosiasi Pemerintah dan Kabupaten seluruh Indonesia, memberikan masukan agar pemerintah memberikan kelonggaran ketentuan batas waktu penyampaian persyaratan

DAK Fisik. Dengan mempertimbangkan efektivitas peningkatan DAK Fisik untuk mencapai program prioritas nasional, pemerintah melakukan perubahan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 dengan ditetapkannya PMK Nomor 112/PMK.07/2017.

Di dalam PMK Nomor 112/PMK.07/2017, batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran DAK Fisik triwulan II diperpanjang selama 40 hari kerja dari tanggal 21 Juli 2017 menjadi paling lambat tanggal 31 Agustus 2017. Perpanjangan batas waktu ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada daerah untuk menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa, termasuk melakukan proses lelang ulang.

PMK Nomor 112/PMK.07/2017 juga memberikan fleksibilitas terhadap kegiatan pembelian barang tahun 2017 melalui *e-catalogue*. Pada bidang DAK Fisik tertentu yang porsi kegiatan pembelian barangnya cukup besar dan pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, seperti DAK Fisik reguler bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), DAK Fisik penugasan bidang kesehatan, DAK Fisik afirmasi bidang kesehatan, DAK Fisik penugasan bidang pendidikan (SMK), dan DAK Fisik afirmasi



Perubahan Penyaluran DAK Fisik akan dimulai tahun 2018. Perubahan pertama adalah perubahan periode penyaluran DAK Fisik.

Foto
Edy Santoso

bidang transportasi, penyalurannya dapat dilakukan sekaligus pada triwulan IV.

Perubahan Penyaluran DAK Fisik

Perubahan Penyaluran DAK Fisik akan dimulai tahun 2018. Perubahan pertama adalah perubahan periode penyaluran DAK Fisik. Perubahan ini ditujukan untuk memberikan fleksibilitas ketercapaian *output* DAK Fisik, sehingga setiap daerah memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa. Perubahan kedua adalah adanya penambahan syarat penyaluran tahap pertama, yaitu berupa rencana kegiatan yang disetujui kementerian teknis. Perubahan ini ditujukan untuk memastikan kesesuaian antara target *output*, lokasi kegiatan, dan prioritas nasional. Sementara itu, perubahan ketiga adalah perubahan besaran persentase di setiap tahap penyalurannya. Perubahan besaran persentase penyaluran ini ditujukan untuk memastikan efisiensi penggunaan dana DAK di daerah.

Tak Sampaikan Laporan, Penyaluran Ditunda

Selain perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik, perubahan juga ditujukan terhadap aturan terkait Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID) dan DAK Nonfisik. Terkait DAU dan DBH, perubahan ketentuan berupa adanya sanksi daerah yang tidak menyampaikan Laporan Belanja Infrastruktur. Sanksi berupa penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sebesar 5 persen. Sanksi dibuat untuk konsistensi pengaturan kewajiban daerah agar menganggarkan paling sedikit 25 persen di dalam DAU dan DBH bagi belanja infrastruktur daerah.

PMK Nomor 112/PMK.07/2017 juga menambah kriteria pemberian DID, khususnya kriteria pelayanan pemerintahan umum. Sedangkan untuk DAK Non Fisik, PMK juga mengubah penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Tidak hanya perubahan penyaluran Dana BOK, PMK juga merubah ketentuan besaran sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2011 yang harus disetor ke kas negara. Besaran sisa dana BOS Tahun anggaran 2011 selama ini ditentukan berdasarkan hasil monitoring BPKP. Untuk daerah yang tidak dilakukan monitor oleh BPKP atau belum dapat ditentukan besaran sisa dana BOS-nya, mereka dapat melakukan

rekonsiliasi ulang dengan BPKP atau perwakilan BPKP setempat. Daerah yang tidak melakukan rekonsiliasi, penyaluran DAU dan/atau DBH-nya akan ditunda.

Penutup

Besarnya peningkatan porsi dana APBN setiap tahun untuk daerah yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah) merupakan bukti keberpihakan pemerintah dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar publik di daerah yang berkualitas. Oleh karenanya, transfer ke daerah perlu dikelola secara akuntabel. Mekanisme penyaluran TKDD perlu terus disempurnakan dengan mendasarkan pada kinerja penyerapan dana dan ketercapaian *output*. Penyusunan PMK 112/PMK/07/2017 menjadi salah satu sarana untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Teks Budi Sulistyono

Pengabdi Masyarakat

Impian sebagai polisi telah dikubur dalam-dalam, kini ia menatap kehidupannya sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi sesama

Bagi Asep Agus Hermanto, sawah merupakan arena bermain yang sangat menyenangkan. Menghabiskan masa kecil di kota Ngawi membuatnya tak memiliki banyak pilihan permainan, selain mengandalkan alam sekitar. Pria kelahiran 10 September 1982 ini pun terbiasa memanfaatkan lahan dengan berkebun. Kegiatannya sepulang sekolah selalu dihabiskan dengan bermain di sawah atau menanam padi dan bawang merah.

Saat masih berusia taman kanak-kanak, Asep, sapaan akrabnya, mengalami cerita kelabu dalam keluarganya. Ayah ibunya terpaksa harus berpisah. Sejak saat itu, kakek dan neneknya yang merawat dan mengasuh Asep hingga dewasa. Dengan keterbatasan itu, Asep sempat mengalami rasa minder saat duduk bangku SD dan SMP. Namun pengasuhan yang penuh disiplin dan kasih sayang dari kakek dan neneknya membuat Asep menjadi anak yang tangguh hingga remaja.

Dengan latar belakang itulah, Asep kini memegang prinsip “Mikul Duwur Mendhem Jero.” Peribahasa Jawa ini memiliki makna segala sesuatu yang baik dari orang tua akan dijunjung tinggi. Sebaliknya, segala hal yang

buruk akan dipendam dalam-dalam. “Saya mengagumi sosok kakek yang tegas, disiplin, dan bertanggung jawab. Sedangkan nenek adalah sosok yang penyabar,” ujar Asep yang semenjak Sekolah Menengah Umum (SMU) mulai mampu berdamai denga masa lalunya.

Takdir di STAN

Dibesarkan oleh kakek yang berprofesi sebagai seorang polisi dan petani membuat Asep bercita-cita menjadi taruna Akademi Kepolisian. Saat duduk di SMU 2 Ngawi, Asep mengasah kemampuan berorganisasi sebagai anggota OSIS. Hingga akhirnya ia diberi amanah menjadi Ketua OSIS SMU 2 Ngawi periode tahun 1999-2000.

Selepas SMU, Asep mendaftarkan diri di Akademi Kepolisian. Sembari menunggu pengumuman tes pemantauan tahap akhir (pantukhir), Asep tergerak untuk mendaftar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Ada cerita menarik saat pria yang merupakan anak tunggal ini mengikuti ujian STAN. “Saya kaget sekali, soal ujiannya hampir 90 persen sama dengan ujian Akpol,” ujarnya tergelak. Memang sulit dipercaya, namun kenyataannya masih lekat dalam ingatan bahwa satu demi satu soal ujian STAN tersebut sama persis dengan ujian Akpol

yang telah dilaluinya. Padahal ia hanya belajar bermodal buku kumpulan soal Akpol dari tahun sebelumnya.

Hingga akhirnya hari pengumuman tiba. Nama Asep tidak ada di daftar peserta yang lolos. “Saya sempat *down*, sampai koma. Hanya bisa terbaring di rumah sakit, bahkan untuk duduk pun tidak bisa,” kenangnya. Ia mengalami depresi di rumah sakit sekitar satu minggu. Diagnosa dokter menyatakan tidak ada masalah dengan kesehatan Asep. Penyakit yang dialaminya bersumber dari kondisi psikis.

Hingga akhirnya ia bangkit setelah mendengar pengumuman diterima sebagai mahasiswa STAN. Meskipun kondisinya masih belum pulih, Asep harus segera menyiapkan keberangkatan ke Jakarta empat hari lagi. “Bahkan saat keluar dari rumah sakit, saya masih duduk didorong menggunakan kursi roda,” tuturnya.

Kiprah sang aktivis

Setelah menginjakkan kaki di Bintaro pada tahun 2001, Asep pelan-pelan melepaskan diri dari cita-cita sebagai polisi. Ia bangkit dari kesedihan dan berusaha menjalani hidup sebagai mahasiswa jurusan Perbendaharaan Negara STAN. Asep kembali melanjutkan

kegemarannya sebagai aktivis organisasi dengan bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa STAN. Totalitasnya dalam berorganisasi membuat Asep dipercaya sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial BEM STAN periode tahun 2002-2003.

Salah satu peristiwa berkesan yang dialami Asep yakni saat membantu mengkoordinir para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia pada tahun 2002. Kala itu, sebanyak 3000 lebih TKI terlantar di Nunukan, Kalimantan Timur, karena tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah. BEM se-Jabodetabek pun melakukan penggalangan dana untuk membantu para TKI tersebut. Perwakilan BEM yang menyerahkan bantuan secara langsung ke Nunukan yaitu BEM dari Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, dan STAN. Asep pun berangkat ke Nunukan sebagai perwakilan BEM STAN.

Sekian banyak pengalaman berorganisasi membuat suami dari Margaria Rani Nurvita ini semakin mantap saat memasuki dunia kerja. Lulus pada tahun 2004, Asep mendapat penempatan di Subdirektorat Pengendalian Defisit dan Surplus Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan. Hingga kini, Asep terhitung telah berpindah unit di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebanyak enam kali.

Asep sempat menjabat sebagai Analisis Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan Junior pada Mei 2017. Terhitung sejak 28 Juli 2017, Asep mengemban amanah baru sebagai Kepala Seksi Evaluasi Pembiayaan dan Perekonomian Daerah di Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, DJPK. Ayah dari tiga putra ini juga dikenal sebagai Duta Transformasi Kelembagaan



Asep menjadi relawan Kemenkeu Mengajar

Foto Dok. Pribadi

(TK) Kemenkeu Tahun 2017. “Menjadi Duta TK bisa memacu diri saya untuk bekerja lebih baik lagi bagi Kemenkeu, tidak hanya terbatas di lingkup DJPK. Saya ingin mengingatkan diri dan mengajak teman-teman bahwa pegawai Kemenkeu berbeda dengan PNS lain, banyak yang sedang dibenahi di institusi kita ini,” ujarnya.

Aktif sebagai pengurus RW

Terbiasa melakukan berbagai kegiatan sosial membuat Asep turut berkontribusi dalam kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya. Pada awalnya, pria yang berdomisili di Permata Kranggan Cibubur, Jakarta Timur ini aktif sebagai bendahara RT (Rukun Tetangga), kini ia mendapat amanah warga sebagai bendahara RW (Rukun Warga). Menariknya, seluruh pekerjaan terkait gaji

pegawai keamanan, kebersihan, taman perumahan, dan sebagainya menjadi swakelola para warga.

Asep bertugas mengelola dana para warga dan mengalokasikan untuk pos-pos pengeluaran tersebut. “Serunya, menghimpun dana warga ternyata tak semudah yang dibayangkan. Ada juga warga yang komplain dan tidak mau membayar,” jelas Asep yang menangani empat RT dalam kompleks perumahannya. Asep kini menikmati suka duka sebagai bendahara RW dan pengurus pengelolaan lingkungan. “Saya hidup tidak di kantor saja, saya juga membutuhkan tetangga dan kondisi lingkungan rumah yang aman dan nyaman,” ujarnya saat ditanya alasan terlibat aktif dalam kepengurusan warga.

Teks Pradany Hayyu

Waktu Pulang



Foto
Jodie Umbara

melewati jalur mudik jelas bukan tanpa perjuangan.

Lalu, apa bedanya dengan hidup yang katanya singkat ini? Bukankah ia sama-sama sebagai suatu perjalanan? Apa bedanya kehidupan di dunia ini dengan ‘kehidupan di kantor’? Bukankah ia sama-sama akan diakhiri satu waktu, yaitu waktu pulang?

Semua perjalanan memiliki batas waktu. Setiap perjalanan memiliki batas akhir. Namun, sudahkah kita menanti-nanti waktu pulang kita selayaknya waktu pulang kantor? Menunjukkan wajah-wajah sumringah layaknya kita menanti jam kantor yang selesai atau masa menanti pulang kampung saat lebaran datang?

Sudahkah kita mempersiapkan bekal perjalanan, sebagaimana sigapnya kita mempersiapkan anggaran mudik untuk lebaran. Merinci tiket pesawat, atau mempersiapkan *angpau* untuk sanak keluarga dan tetangga saat di kampung nanti? Atau sudahkah kita menyediakan bekal perjalanan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana bersungguh-sungguhnya kita dalam menyiapkan bahan presentasi di kantor saat hendak mendampingi pimpinan rapat?

Jadi, sudahkah kita?

Teks Chairunisah

televisi, hingga hal-hal yang terlihat sepele lainnya. Pulang ke rumah menjadi momen yang ditunggu-tunggu, meski perjalanan pulang dari kantor ke rumah bukan tanpa perjuangan.

Lebih luas dari itu, apa yang ditunggu-tunggu saat perayaan hari besar? Bisa jadi salah satunya adalah pulang ke kampung halaman. Saat dimana kita bisa berkumpul bersama keluarga besar, hingga berkunjung pada sanak saudara, kerabat, maupun tetangga lama yang tidak bisa setiap saat kita temui.

Pulang ke kampung menjadi ritual tahunan, sebab sebagian besar dari kita hanya bisa menikmatinya satu kali saja setiap tahunnya. Maka, pulang kampung menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Meski lagi-lagi, perjalanan pulang

Jika ada pertanyaan, *kapan para pegawai kantor menunjukkan wajah cerah dengan senyum sumringah?* Boleh jadi jawabannya adalah saat jarum jam membentuk sudut 150 derajat. Yaitu manakala jarum pendek menunjuk angka lima, sedangkan jarum panjang berada di angka 12.

Setelah seharian memfokuskan diri pada pekerjaan, wajah-wajah itu kembali riang. Berbinar-binar mata pegawai saat bertemu dengan rekan kerja lainnya di dalam lift, atau saat mengantre bersama di depan mesin absen. Betapa bahagianya waktu pulang kantor.

Terbayang sudah nikmatnya pulang ke rumah. Bertemu istri atau suami, berbincang dengan mereka, menemani anak bermain dan belajar, menonton



Annabelle Creation: Bukan Sekadar Spin-Off

Pada awalnya, saya tidak tertarik dengan “Annabelle: Creation”. Saya mengira film ini dibuat untuk sekadar meraup keuntungan komersial dengan mendompleng popularitas boneka Annabelle yang tenar berkat film “The Conjuring” di tahun 2013 lalu. Dan saya rasa prasangka tersebut beralasan, mengingat bahwa setahun setelah “The Conjuring”, Hollywood merilis film *spin-off* “Annabelle” yang menurut saya adalah film yang buruk. Walau demikian, satu hal yang membuat saya tetap tergerak ke bioskop menyaksikan “Annabelle: Creation” adalah sutradaranya, David F. Sandberg, yang berhasil memukau saya berkat film “Lights Out” di tahun 2016 lalu. Pengalamannya mengolah keseraman secara unik, efektif, dan segar dalam “Lights Out” menumbuhkan ekspektasi saya terhadap “Annabelle: Creation”.

Secara singkat, “Annabelle: Creation” menceritakan tentang dua anak asuh,

Janice (Talitha Bateman) dan Linda (Lulu Wilson), yang diganggu oleh kehadiran suatu roh jahat di rumah tempat mereka tinggal. Sesuai dengan judulnya, dalam “Annabelle: Creation” ini juga diceritakan bagaimana pertama kali boneka Annabelle dibuat dan bagaimana boneka Annabelle bisa dirasuki roh jahat, yang membawa petaka bagi pemiliknya.

Bagi saya, ketegangan demi ketegangan dalam “Annabelle: Creation” didesain dengan sangat baik melalui efek suara yang efektif, yang tidak sekadar memekakkan telinga tanpa tujuan tertentu. Atmosfer kengerian dalam “Annabelle: Creation” juga berhasil terbangun secara perlahan melalui penceritaan yang terfokus. Terlepas dari olahan teknisnya, menurut saya unsur terpenting dari “Annabelle: Creation” adalah karakterisasi tokoh-tokoh utamanya. Sementara film-film horor lainnya lebih memilih berkutat pada bagaimana memunculkan hantu yang mengerikan atau bagaimana mengagetkan

penonton, “Annabelle: Creation” masih peduli untuk membangun karakterisasi bagi tokoh-tokohnya. Ada beberapa momen di mana Anda akan merasa simpatik dengan anak-anak asuh yang diganggu roh jahat, membuat Anda seolah-olah memihak kepada mereka. Bagi saya, ini adalah suatu nilai plus—apalagi, secara keseluruhan, “Annabelle: Creation” tetap terorkestrasi sebagai horor yang tidak kelewat dramatis.

Keluar dari bioskop setelah menyaksikan “Annabelle: Creation”, prasangka saya benar-benar tergantikan dengan kepuasan: betapapun *spin-off* ini adalah caranya Hollywood untuk meraup keuntungan, masih ada kualitas yang bisa saya nikmati tanpa membuat saya merasa bodoh. “Annabelle: Creation” menjadi bukti bahwa genre horor yang belakangan ini usang sepertinya masih memiliki masa depan yang menjanjikan.

Peresensi Akbar Saputra
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Reyog Ponorogo yang Termasyhur

Ponorogo identik dengan Reyog, sebuah kesenian tari megah dengan penokohan dan alur cerita seperti pertunjukan teatrikal. Tarian ini memuat adegan-adegan akrobatik dan sedikit klenik, ‘bumbu’ yang biasanya bisa membuat penonton lebih tertarik mendekat.

Dalam tiap tari Reyog selalu ada lakon Warok, Jathil, Bujang Ganong, Kelana Sewandana dan Dadak Merak. Warok adalah gambaran prajurit kerajaan yang gagah berani, sangar, dan memiliki ilmu bela diri supranatural atau biasa disebut kanuragan. Tarian warok selalu tegas, kompak dan berwibawa. Jathil, pasukan berkuda wanita yang anggun dan cantik, menjadi pemanis dalam keseraman pertunjukan Reyog. Keluwesan tari menjadi hal penting yang ditonjolkan dalam tariannya.

Bujang Ganong adalah lakon yang paling menarik. Sosok mahapatih ini digambarkan cekatan dan lincah. Tariannya sangat akrobatik, bahkan mendekati pertunjukan sirkus. Bedanya, Bujang Ganong memilik beberapa pakem tari yang khas dan topeng yang ikonik. Sosok paling bijaksana hadir dalam tokoh Raja Kelana Sewandana. Dia menari penuh wibawa dengan senjatanya Pecut Samandiman. Terakhir adalah

sang pembuat onar, Dadak Merak yang digambarkan sebagai tokoh antagonis. Dadak Merak adalah tokoh sentral yang lazim diketahui sebagai ‘Reyog’. Butuh latihan dan keahlian khusus untuk dapat menari dengan mengangkat topeng Dadak Merak berukuran besar hanya dengan gigi.

September adalah bulan terbaik jika anda ingin melihat pertunjukan Reyog di Ponorogo. Di bulan ini setiap tahun diadakan Festival Reyog Nasional. Selain dipenuhi oleh wisatawan mancanegara, grup Reyog dari luar negeri pun turut meramaikan acara ini. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sangat sadar bahwa potensi Reyog bisa menjadi andalan pariwisata jika dikelola dengan baik. Untuk itu, sejak tahun 1987 Bupati Soebarkah Poetro Hadiwirjo memberi wadah untuk melestarikan Reyog. Acara ini diberi tajuk “Grebeg Suro”. Grebeg Suro juga sekaligus menampung prosesi-prosesi tradisi khas Ponorogo pada peringatan malam 1 Suro. Misalnya saja Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel, Kirab Pusaka, dan tentunya yang paling ditunggu, Festival Reyog Nasional.

Topeng Reyog berukuran 2,25x2,3 meter dengan berat hampir 50kg. Rasanya sangat susah merangkul generasi muda untuk meneruskan minat terhadap Reyog. Menyadari hal

itu, Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga memfasilitasi generasi muda dengan konsep Festival Reyog Mini. Tak kalah menarik dan tak kalah megah, biasanya festival untuk para junior ini diadakan menjelang hari jadi Kabupaten Ponorogo yang ditutup dengan pesta kembang api.

Tahun ini, Pemkab Ponorogo memutuskan untuk menggabungkan Peringatan Hari Jadi Ponorogo ke-521 dengan Perayaan Grebeg Suro 2017. Dengan begitu, Festival Reyog mini ke-15 akan dilaksanakan beriringan dengan Festival Nasional Reyog Ponorogoke-24. Sebuah kesempatan menarik untuk melihat bagaimana masyarakat Ponorogo berpesta dalam tradisi yang mereka banggakan. Mendekati September, anak-anak di tiap Kecamatan sudah dipersiapkan untuk membawa nama baik kecamatan mereka masing-masing.

Ponorogo sepertinya bisa jadi contoh daerah yang berhasil menjaga kesenian dan budaya mereka. Acara perayaan Reyog semakin meriah dan menarik setiap tahunnya. Semoga keadaan ini bertahan dan berkembang dan tak lekang oleh waktu.

Teks dan foto Yogi Bayu Avian,
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak



Pertunjukan
Reyog ponorogo

Merdeka dalam Bercanda



Jalan hidup menjadi komika (*stand-up comedian*) dimulai semenjak Sekolah Menengah pertamanya. Saat itu, Pandji Pragiwaksono atau akrab disapa Pandji sudah memiliki bakat dalam membuat orang lain tertawa. Selain itu, ia mempunyai kelebihan berbicara di depan khalayak umum dalam waktu yang lama. Dalam wawancara dengan Media Keuangan, ia sempat bercerita tingkah lucunya kala ia mengenyam pendidikan di sekolah menengah. Ketika di SMP, ia sering berdiri di depan kelas untuk berpura-pura menjadi guru dan bercerita panjang lebar terkait berbagai macam hal. Dengan banyolannya, ia selalu ditertawakan oleh teman sekelasnya. Sempat beberapa temannya memanggilnya dengan sebutan *stand-up comedy*, namun saat itu ia belum mengerti tentang hal itu. Saat kuliah pun, ia sering disuruh berbicara asal-asalan tentang berbagai benda-benda sekelilingnya seperti kecap dan sandal *swallow*. “Jadi terus saya pikir saya *kan* lagi di masa pencarian jati diri. Saya ini lahir untuk jadi apa. Kok *skill*-nya aneh banget bisa bikin orang ketawa sama kuat ngomong lama”, ceritanya.

Istilah *stand-up comedy* sendiri pertama kali dikenalnya saat dia pergi ke

Pasar Kembang di Bandung. Waktu itu, ia membeli sebuah DVD Robin Williams yang sedang melakukan *stand-up comedy* di panggung Broadway Amerika Serikat. Dari menonton aksi Robin tersebut, ia terinspirasi untuk menjadi komika, meskipun profesi sebagai komika belum terlalu menjanjikan saat itu. Baru pada tahun 2010 di Jakarta, Pandji memberanikan diri melakukan *stand-up* pertamanya secara profesional.

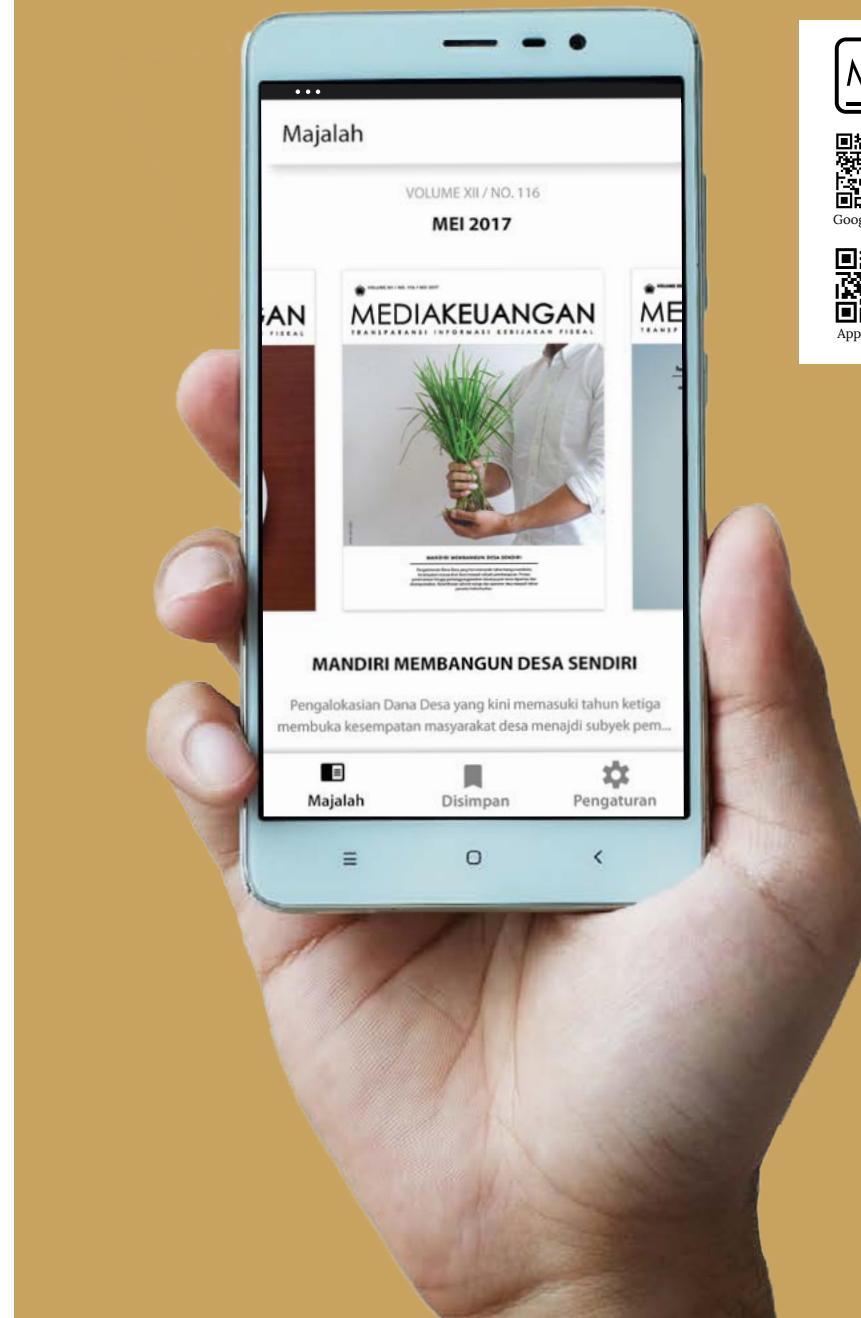
Menurut Pandji, menjadi komika memang butuh disiplin ilmu tersendiri dalam pembuatan materinya. Kepada Media Keuangan, ia memberikan tips dalam menulis *storyline* sebuah cerita komika. Pertama, yang perlu dilakukan adalah jadikan diri kita sendiri sebagai editor pertama. Komika sebaiknya melakukan ‘tes kelucuan’ terhadap dirinya sendiri. Tujuannya adalah menilai apakah cerita tersebut sudah cukup membuat dirinya sendiri tertawa. Yang kedua, komika juga perlu memperhatikan beberapa hal teknis lainnya, seperti *prolog*, *punch line* dan *closing story*. Terakhir, apabila membawakan topik yang berat, komika dapat menceritakannya dengan teknik mengaitkan topik tersebut ke dalam hal-hal yang berhubungan dengan diri

sendiri. Tujuannya agar orang lain bisa dengan mudah mencerna cerita.

Di sisi lain, Pandji juga menulis buku ‘Merdeka Dalam Bercanda’. Pesan yang ingin disampaikan adalah mendorong masyarakat Indonesia agar terbuka dalam menyampaikan pendapat dan memandang suatu masalah. Menurutnya, permasalahan utama orang Indonesia saat ini adalah cenderung menghindari konflik. Padahal dengan pembahasan isu yang bersifat penting namun tabu tersebut akan dapat mengurai solusi yang dapat menyelesaikan masalah. Beberapa contoh isu berat yang pernah ia bawaan melalui panggung komika adalah terkait masalah ekonomi, pemerkosaan, konservasi alam, HAM, gay dan atheisme.

Terkait dengan hak dan kewajiban bernegara, Pandji berpendapat bahwa setiap orang yang menginginkan hak dalam bernegaranya juga harus bisa memenuhi kewajibannya. “Sebagai warga negara kita mempunyai hak dan kewajiban. Hak kita untuk mengeluarkan pendapat dan bersuara, ‘merdeka dalam bercanda’. Kewajiban kita, menurut saya, adalah untuk membayar pajak”, tutupnya.

Teks Abdul Aziz



Akses isu-isu ekonomi hanya dengan sekali *tap*.

Install aplikasi Majalah Media Keuangan pada perangkat Anda.



MAJALAH MEDIA KEUANGAN





MEMPERINGATI HARI TANI NASIONAL
24 SEPTEMBER 2017



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA